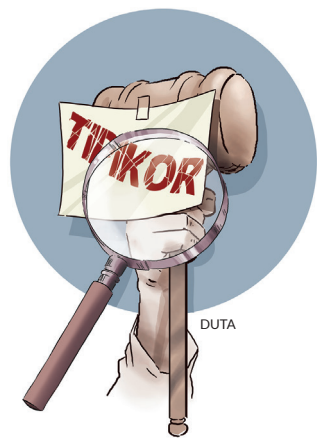


EDITORIAL

Jangan Tenggelam dalam Debat Korupsi



PERDEBATAN mengenai definisi korupsi kembali mengemuka setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaitkannya dengan kebutuhan merevisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Perdebatan itu sah, bahkan diperlukan. Hukum bukan kitab suci yang haram disentuh. Ia mesti terus dievaluasi agar mampu menjawab perkembangan zaman, menutup celah penyimpangan, sekaligus menjamin kepastian dan keadilan bagi semua pihak.

Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Perdebatan tentang korupsi jangan sampai justru mengalihkan perhatian dari korupsi itu sendiri. Jangan sampai kita terlalu sibuk memperdebatkan definisi kejahatan, sementara para penjahat leluasa melanjutkan perbuatan mereka.

Pemberantasan korupsi memang membutuhkan landasan hukum yang kokoh. Rumusan delik harus jelas, unsur pidana mesti terukur, dan penegakan hukum tidak boleh membuka ruang kriminalisasi terhadap kebijakan yang diambil dengan iktikad baik.

Sebaliknya, revisi regulasi juga tidak boleh menjadi pintu masuk pelemahan pemberantasan korupsi. Jangan sampai atas nama kepastian hukum, ruang gerak aparat justru dipersempit, pembuktian dipersulit, atau pertanggungjawaban pelaku kejahatan semakin mudah dielakkan.

Di sinilah pentingnya menjaga perdebatan tetap konstruktif. Setiap usulan perubahan mesti diuji secara terbuka, berdasarkan argumentasi hukum yang jernih, pengalaman penegakan hukum, serta kepentingan publik. Bukan sekadar adu tafsir, apalagi pertarungan kepentingan.

Perlu dicatat, Yusril menegaskan revisi bukan dimaksudkan melemahkan pemberantasan korupsi. Pemerintah juga hendak menyelaraskan UU Tipikor dengan Konvensi PBB Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC). Komitmen itu patut diuji melalui substansi perubahan, bukan berhenti pada pernyataan.

Kita tentu menghendaki hukum yang adil sekaligus efektif. Pejabat yang mengambil keputusan secara jujur tidak semestinya diperlakukan sama dengan mereka yang sengaja menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi.

Namun, perlindungan terhadap pengambil kebijakan tidak boleh berubah menjadi perlindungan bagi penyalah guna kekuasaan.

Lebih penting lagi, pembaruan hukum harus berjalan beriringan dengan penindakan yang konsisten, penguatan lembaga antikorupsi, serta percepatan pemulihan aset hasil kejahatan.

Jangan sampai revisi menjadi pekerjaan besar yang menyita perhatian, sedangkan agenda mendesak pemberantasan korupsi justru terabaikan.

Negeri ini tidak kekurangan perdebatan tentang korupsi. Yang masih harus terus dibuktikan ialah kemampuan menghentikan praktiknya.

Karena itu, silakan berdebat, silakan mengevaluasi, bahkan merevisi undang-undang jika memang diperlukan. Namun, jangan pernah mengundurkan perang melawan korupsi. Hukum boleh diperbarui, tetapi pemberantasan korupsi pantang berjalan mundur.

Silakan tanggapi melalui:
www.mediaindonesia.com dan
www.metrotvnews.com
Simak tayangannya di:
www.mediaindonesia.com/editorials



BPMI SETPRES/LAILY RACHEV

TERIMA MENLU SINGAPURA DI HAMBALANG: Presiden Prabowo Subianto menerima permohonan pertemuan dari Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah sejumlah persoalan yang menjadi perhatian kedua negara, di antaranya kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap hingga kebijakan pengurangan ekspor gas.

Aksi Sulap Beras SPHP Rusak Kepercayaan

- Barang bukti yang ditemukan mencapai 600 ton.
- Beras SPHP dikemas ulang dan dijual seharga beras premium.
- Diduga ada keterlibatan dari pegawai Bulog.
- Harga beras di daerah naik sekitar 20%.

NAUFAL ZUHDI

naufal@mediaindonesia.com

AKSI mafia pangan yang memalsukan serta diduga mengoplos beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai beras premium dikhawatirkan menggerus kepercayaan publik.

“Praktik ini merupakan pemalsuan produk yang juga dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga keterjangkauan pangan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A Rozak di Jakarta, kemarin.

Apalagi, lanjut dia, program SPHP bertujuan menjaga ketersediaan beras dan membantu menstabilkan harga di tingkat konsumen.

RUGIKAN MASYARAKAT

Dalam inspeksi oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta Timur, kemarin, didapati toko beras yang mengemas beras SPHP sebagai beras premium. Dalam inspeksi tersebut, tim juga menemukan lokasi pengemasan, tumpukan beras, serta kendaraan yang diduga telah disiapkan untuk mendistribusikan beras SPHP yang diubah menjadi beras premium.

Berdasarkan laporan awal, barang bukti yang ditemukan mencapai sekitar 600 ton. Namun, Amran memperkirakan jumlah beras yang

Dugaan Pengoplosan Beras Subsidi Jadi Premium

- **Lokasi:** Toko/Rumah Beras Kayumanis, Matraman, dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
- **Modus:** Beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diduga dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium.

Perbandingan Harga Per Kilogram (Kg)	<ul style="list-style-type: none">• Beras SPHP: Rp12.500/kg• Harga jual premium: Rp17.000/kg• Selisih harga: Rp4.500, sebelum biaya operasional dan distribusi.• Subsidi pemerintah: Sekitar Rp6.000/kg, menurut Menteri Pertanian.
---	--



Temuan dan Dugaan Jaringan

- **Barang bukti awal:** Sekitar 600 ton beras.
- **Dugaan skala praktik:** Diduga mencapai ribuan ton; masih didalam.
- **Dugaan asal beras:** Gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- **Dugaan jaringan:** Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menduga adanya keterlibatan sindikat mafia beras.
- **Penanganan kasus:** Pelaku utama disebut telah ditangkap; polisi mendalami jalur distribusi dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Sumber: Kementan/Litbang MI

telah diselewengkan mencapai ribuan ton.

Padahal, tegas Amran, beras SPHP diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di desil 1 hingga 5.

“Tidak ada lagi kemanusiaan-nya. Ini adalah jatah beras untuk orang miskin. Kemudian ini barang disubsidi, justru dioplos, dirampok. Ini biadab,” kata Amran.

Apalagi, praktik tersebut turut memengaruhi kenaikan harga beras di pasaran. Beras bersubsidi yang seharusnya dijual Rp12.500 per kilogram, sambung Amran, dioplos dan dikemas ulang hingga dipasarkan sebagai beras premium dengan harga Rp17 ribu per kilogram.

MODUS PELAKU

Amran menjelaskan modus pelaku ialah mengambil beras SPHP, dikemas ulang, dan dijual sebagai beras premium. Mentan mengatakan penyidik masih mendalami apakah beras SPHP tersebut dicampur dengan beras lain atau langsung dikemas ulang untuk dipasarkan sebagai beras premium.

Pelaku utamanya, ungkap Amran, telah ditangkap. Pihak kepolisian pun masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak

lain. Ia juga menduga keterlibatan pihak Perum Bulog dalam kasus ini. Apalagi, sejauh ini didapati kalau toko tersebut mendapatkan pasokan beras SPHP dari gudang Bulog di Kelapa Gading.

“Yang terlibat dari Bulog, sudah pasti dipecat. Dan kami akan kirim surat ke ke kepolisian untuk ditindaklanjuti, jadi dipenjara juga,” kata Amran.

PANTAUAN HARGA

Berdasarkan pantauan *Media Indonesia*, harga beras di berbagai daerah mulai naik cukup signifikan. Beras premium di Tasikmalaya, Jawa Barat, misalnya, dari Rp14 ribu jadi Rp17 ribu per kilogram atau naik lebih dari 20%.

Kenaikan harga beras juga berlangsung di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Seorang pedagang beras di Pasar Batu Cermin, Suryani, 51, mengungkapkan kenaikan harga sudah berlangsung sejak terjadi gempa pada Agustus lalu.

“Sejak bencana, harganya naik. Kami beli dari petani sudah Rp750 ribu per 50 kg (Rp15 ribu/kg), sebelumnya Rp650 ribu (Rp13 ribu/kg),” kata Suryani. (AD/MM/X-4)

GEOPOLITIK

Komunikasi Indonesia-Singapura Redakan Ketegangan

Pemerintah Malaysia membantah ada perusahaan perkebunan yang memiliki keterkaitan dengan negara itu terlibat dalam karhutla di Indonesia.

PRESIDEN Prabowo Subianto mengabulkan permohonan Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakrishnan untuk menghadap. Kepala Negara menerima Balakrishnan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kemarin sore.

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah sejumlah persoalan yang menjadi perhatian kedua negara, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap hingga kebijakan pengurangan ekspor gas ke Singapura oleh Indonesia.

Sehari sebelumnya, Menlu Singapura telah bertemu Menlu RI Arrmanatha Nasir. Keduanya sepakat antara lain membentuk satuan tugas (satgas) bersama untuk memperkuat penindakan terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas karhutla serta kabut asap lintas batas.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, menilai komunikasi langsung di antara pejabat kedua negara diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman dan meredakan ketegangan ketika muncul persoalan bilateral.

“Jalur komunikasi langsung di tingkat menteri dan pejabat senior penting untuk memastikan setiap persoalan dapat dibicarakan secara cepat dan konstruktif,” tegas Suzie kepada *Media Indonesia*.

Kesepakatan pembentukan satgas dapat menjadi langkah konkret untuk memperkuat koordinasi lintas negara. Kedua negara dapat menindak perusahaan yang terbukti terlibat serta menelusuri aliran dana dan bukti yang berkaitan dengan karhutla.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah menyikapi secara bijak perhatian dan kritik dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura terkait dengan bencana karhutla serta kabut asap lintas batas.

“Kritik tidak perlu dibalas dengan ketersinggungan, kritik perlu dijawab dengan kerja yang dapat diuji,” ujar Dasco.

LANGKAH MALAYSIA

Sementara itu, pemerintah Malaysia membantah ada perusahaan perkebunan yang memiliki keterkaitan dengan negara itu terlibat dalam karhutla di Indonesia. Hal tersebut merespons Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang mengungkap dugaan keterlibatan 21 perusahaan terkait dengan Malaysia dalam karhutla di Indonesia sepanjang tahun ini.

“Berdasarkan tinjauan sejauh ini, tidak ada bukti konklusif bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki keterkaitan dengan Malaysia bertanggung jawab atas kebakaran tersebut,” ujar Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Arthur Joseph Kurup, dilansir *The Star*, kemarin.

Di sisi lain, pemerintah Malaysia tengah mempertimbangkan kemungkinan menempuh jalur hukum internasional untuk menuntut kompensasi atas dampak kabut asap yang menyelimuti negaranya. (Mir/Fer/Faj/X-5)

PODIUM

Lafalan Suci untuk Korupsi

BETUL kata orang, kiranya kita memang harus menyiapkan obat penenang dulu sebelum membaca atau menon-ton berita. Terlihat banyak keanehan dan kekonyolan di negeri ini.

Dulu, ada seorang menteri yang mengurus agama menjadi pesakitan karena korupsi. Apa yang terjadi saat dia disidang di pengadilan? Gema takbir beberapa kali dikumandangkan. Oleh siapa? Oleh pengunjung sidang yang tentu pendukung pak menteri. Koruptor dibela dengan membawa-bawa agama. Itu bukan sekadar cerita pengantar tidur. Itu fakta.

Dulu, ada mantan direktur utama BUMN raksasa yang juga tersandung perkara rasywah. Sesaat setelah majelis hakim membacakan vonis, dia berdiri sembari memekiknya takbir. *Allahu Akbar*. Lagi-lagi lafal suci dipakai ketika seseorang diadili



JAKA BUDI SANTOSA
Dewan Redaksi Media Group

karena korupsi.

Belum terlalu lama, bekas bupati di Kalimantan Timur pulang kampung setelah bebas dari penjara lantaran korupsi. Apa dilakukan warga kampung itu? Mengelu-elukannya. Menyambutnya dengan sangat antusias. Untaian bunga dikalungkan. Bahkan, tak cuma ekspresi kegembiraan, melainkan juga suara takbir. Lagi dan lagi, kalimat mulia dilafalkan untuk orang yang berlaku sangat tidak mulia.

Belakangan, hal serupa terulang. Seorang bupati nonaktif dari Jawa Tengah tengah mempertaruhkan nasib di pengadilan tipikor. Dia diduga korupsi. Apa yang terjadi? Saban sidang berlangsung, ratusan pendukungnya menggeruduk pengadilan. Memberikan dukungan. Apa yang dilakukan sang koruptor? Dia menemui para loyalisnya itu lalu dengan

intonasi tenang, tapi lantang, menyerukan takbir. *Allahu Akbar...Allahu Akbar... Allahu Akbar!*

Dengan takbir, dia barangkali hendak meyakinkan tak bersalah, tapi dizalimi sehingga harus melawan. Yang dia lawan seolah bukan KPK, bukan jaksa, bukan hakim, melainkan pasukan Quraisy di Perang Badar. Dengan takbir, dia hendak menjaga semangat *diehard*-nya untuk terus memberikan dukungan. Dukungan kepada seseorang yang diduga melakukan kejahatan luar biasa bernama korupsi.

Masih ada lagi. Eks menteri ini juga sedang berurusan dengan kasus korupsi. Dia rutin menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Di setiap sidang itu pula para pendukungnya setia memberikan dukungan secara langsung. Tidak cuma satu, dua, atau tiga orang, tapi jauh lebih banyak. Bisa ratusan yang datang. Apa yang mereka lakukan? Tak cuma mendukung dalam diam, tapi juga dengan selawatan. Bukan istigfar yang diucapkan, melainkan selawat *asyghil* yang dilantunkan.

Selawat *asyghil* digubah Imam Ja'far Ash-Shadiq yang wafat pada 138 H. Narasinya ialah pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Kata *asyghil* di bahasa Arab berarti 'si-bukkanlah'. Intinya, permohonan kepada Allah agar orang-orang yang berniat jahat atau zalim disibukkan dengan urusan atau

pertikaian di antara sesama mereka sehingga umat Islam yang tidak bersalah dapat terselamatkan.

Begitulah, kalimat-kalimat suci, takbir, selawat, kini seolah menjadi menu tak terlewatkan dalam perkara korupsi. Sungguh sulit diterima akal dan nurani. Bagaimana bisa ayat-ayat yang begitu sakral digunakan untuk membela orang yang melanggar ajaran agama? Takbir yang seharusnya mengecilkan manusia di hadapan Tuhan dipakai untuk membesarkan ego korupsi di hadapan hukum. Selawat yang semestinya melembutkan hati dipakai untuk mengeraskan pembelaan pada kejahatan.

Kiranya agama sedang di-*cosplay*. Dipakai sebagai kostum. Ketika jas korupsi sudah bau anyir, mereka pinjam jubah agama supaya harum. Ketika logika hukum sudah mentok, mereka jual ayat agar lolos dari jerat hukuman.

Ironi itu terlalu telanjang untuk dianggap biasa. Terdakwa korupsi memang belum tentu bersalah. Dia berhak membela diri, juga boleh dibela. Namun, membela dengan membawa-bawa agama sungguh sulit diterima. Percayalah, meyakinkan bahwa dirinya benar dengan membawa kalimat suci malah membuat kebanyakan rakyat semakin muak.

Tak salah jika ada yang menyebut fenomena itu sebagai pembajakan agama. Ko-

rupsi ialah kejahatan kemanusiaan. Semua agama jelas dan tegas melarang. Dalam fikih, ia adalah *ghulul*, khianat. Dalam bahasa konstitusi, ia adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Uang yang mereka korupsi bukanlah uang monopoli, melainkan uang *beneran* yang pada akhirnya menyeng-sarakan rakyat. Lalu atas dasar apa agama dipakai untuk membelanya?

Yang terjadi di ruang dan pelataran pengadilan bukanlah pembelaan agama. Itu lebih tepat disebut penggunaan agama sebagai tameng. Sebagai alat negosiasi moral. Logikanya primitif tapi efektif, yakni jika yang membelanya orang beragama, yang dibela pasti orang beragama yang dizalimi. Itu boleh dibilang politik identitas yang culas. Itu kesalehan yang kehilangan moral.

Apa akibatnya? Bisa fatal. Kita seakan sedang mengajarkan kepada umat bahwa agama bisa dipakai sesukanya. Bahwa kesalahan personal bisa memutihkan kejahatan. Itu teologi yang rusak. Kita juga sedang menghina akal sehat umat. Seolah-olah mereka bodoh sehingga cukup dibacakan satu ayat dan takbir lalu lupa uang mereka baru saja digasak.

Takbir tidak pernah diajarkan untuk membuat ciut nyali penegak hukum yang jujur. Takbir diajarkan untuk membuat takut penguasa yang korup dan zalim. Jangan dibalik.



MI/USMAN ISKANDAR

BELAJAR SEJARAH SUMPAH PEMUDA: Pelajar menyimak penjelasan dari guru saat mengunjungi Museum Sumpah Pemuda, Jakarta, kemarin. Museum yang menjadi saksi sejarah lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 tersebut menyimpan beragam artefak, foto, dan dokumentasi perjalanan pergerakan pemuda Indonesia. Setiap peringatan Hari Sumpah Pemuda, museum tersebut ramai dikunjungi pelajar untuk mengenang sejarah perjuangan pemuda sekaligus menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Berikan Ruang Luas kepada Generasi Muda

- Kesempatan bagi anak muda perlu diberikan untuk menjawab persoalan bangsa sekaligus mengajukan gagasan.
- Anak muda diajak meneruskan semangat Sumpah Pemuda dengan menghasilkan karya dan kontribusi nyata.
- Pemerintah menyadari masih banyak tantangan yang butuh kerja berkelanjutan, evaluasi, dan perbaikan.

M ILHAM RAMADHAN
ilham@mediaindonesia.com

PERINGATAN Hari Sumpah Pemuda 2026 mesti menjadi tonggak bagi negara untuk lebih mendengar dan memberikan ruang kepada generasi muda untuk bisa membawa kemajuan dan menentukan masa depan bangsa.

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan kesempatan bagi anak muda perlu diberikan untuk menjawab persoalan bangsa sekaligus mengajukan gagasan. “Mendengar pemuda berarti memberikan tempat bagi pengalaman dan pemikiran mereka dalam menentukan arah Indonesia. Kita perlu membangun hubungan yang memungkinkan mereka bertanya, menyampaikan kritik, dan menawarkan solusi,” kata Puan di Jakarta, kemarin.

Di sisi lain, ia mengingatkan anak muda Indonesia agar tidak melupakan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan di tengah berbagai tantangan kompleks akibat arus disrupsi teknologi, perubahan sosial, dan tekanan ekonomi yang bergerak sangat cepat. “Berbagai tantangan itu harus menjadi motivasi bagi generasi muda, bukan hambatan untuk maju.”

KEKUATAN PERSATUAN

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman Indonesia dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026. Prasetyo mengajak generasi muda meneruskan semangat perjuangan para pemuda dengan menghasilkan karya dan kontribusi nyata bagi masyarakat. “Atas nama Presiden dan pemerin-

tah, kami mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Momentum ini mengingatkan kita bahwa persatuan merupakan kekuatan utama bangsa Indonesia,” ujar Prasetyo dalam keterangannya, kemarin.

Ia menegaskan pemerintah berkomitmen memperluas kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan mengambil bagian dalam pembangunan nasional. Dukungan tersebut diharapkan membuka ruang bagi pemuda untuk meningkatkan kemampuan sekaligus menghasilkan gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat.

DIWARNAI AKSI

Tak hanya diperingati dengan seremoni, Hari Sumpah Pemuda di beberapa daerah juga diwarnai dengan demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat. Aksi dengan jumlah massa yang besar setidaknya terpantau dilakukan di Jakarta dan Yogyakarta. Di Jakarta, aksi dipusatkan di Bundaran HI, sedangkan di Yogyakarta, konsentrasi demonstrasi ada di dua titik, yaitu di depan Gedung DPRD DIY dan titik 0 kilometer.

Massa aksi di kedua kota tersebut menyoroti sejumlah isu, mulai penanganan bencana ekologis, penggunaan anggaran negara, biaya pendidikan, reformasi hukum, hingga perlindungan HAM dan demokrasi.

Aksi di Jakarta diinisiasi kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komite Sadar. Mereka antara lain termasuk BEM Universitas Indonesia, BEM Keluarga Mahasiswa UPN ‘Veteran’ Yogyakarta, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, dan BEM Universitas Diponegoro.

RESPONS PEMERINTAH

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadhana mengatakan pemerintah merespons positif lima isu yang menjadi perhatian mahasiswa. Pemerintah, kata Kurnia, menilai aspirasi mahasiswa melalui demonstrasi merupakan bagian penting dari pengawasan publik. “Pemerintah menyadari berbagai capaian itu bukan berarti seluruh persoalan telah terselesaikan. Masih ada tantangan yang butuh kerja berkelanjutan, evaluasi, dan perbaikan,” ucap Kurnia dalam keterangannya, kemarin.

Menurutnya, demokrasi perlu dirawat melalui keterbukaan terhadap kritik, penghormatan atas perbedaan pandangan, serta perlindungan hak masyarakat sesuai konstitusi. “Aspirasi yang disampaikan mahasiswa jadi masukan penting untuk memastikan kebijakan pemerintah makin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya. (AT/Ant/X-3)

Daerah Bertahan di Status Siaga Darurat

BMKG memperkirakan musim kemarau masih berlangsung hingga akhir November 2026 sehingga masih rawan munculnya titik-titik api baru.

INTENSITAS kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap, khususnya di Kalimantan Selatan (Kalsel), mereda. Hal itu berkat turunnya hujan beberapa hari imbas kegiatan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang digelar BNPB bersama TNI-AU dan BMKG.

Kendati begitu, Pemerintah Provinsi Kalsel memperpanjang status siaga darurat karhutla dan kekeringan hingga akhir November 2026.

“Sedianya status ini berakhir pada 31 Oktober, tetapi karena berbagai pertimbangan, kita perpanjang satu bulan hingga akhir November mendatang,” ungkap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel Ronny Eka Saputra, kemarin, di sela peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026 di Banjarbaru.

Pertimbangan tersebut antara lain kondisi karhutla dan kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kemudian, perkiraan musim kemarau yang masih berlangsung hingga akhir November 2026 dari BMKG.

SEBAR PERINGATAN

Di wilayah Sumatra, Polda Riau mengirimkan 260 papan peringatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk dipasang di lokasi bekas kebakaran yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau.

“Pemasangan 260 plang ini merupakan langkah preventif kebakaran berulang sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar meskipun saat ini kondisi karhutla di Riau relatif terkendali,” ujar Kapolda Riau Irjen Arman Achdiat, kemarin.

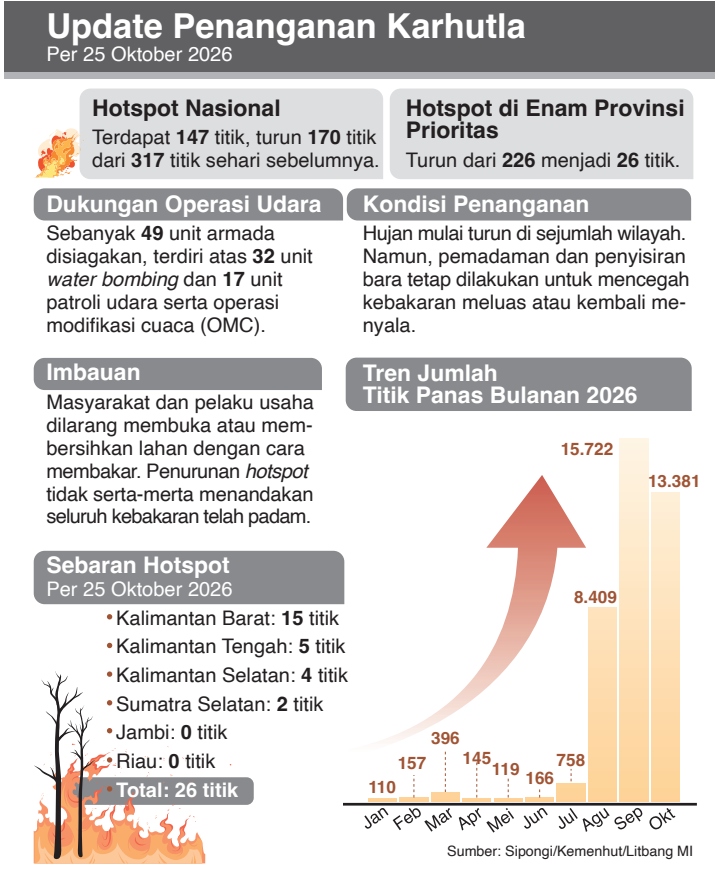
Kapolda menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan kemarin, tidak ditemukan titik api aktif di wilayah Riau. Asap yang terpantau merupakan asap kiriman akibat karhutla di provinsi lain. Meski demikian, personel tetap disiagakan di sejumlah wilayah rawan.

Provinsi Riau mendapatkan bantuan pemerintah pusat untuk penanganan dan pencegahan karhutla senilai total Rp30 miliar. Bantuan itu mulai disalurkan ke sejumlah pemerintah atas (ISPA) sebagai dampak asap karhutla. Hingga kemarin tercatat 17.867 kasus, sedangkan sebelumnya hanya 5.000 kasus.

Pemerintah Kabupaten Bangka, menurut Kepala Dinas Kesehatan Nora Sukma Dewi, mengupayakan agar pasien-pasien ISPA dari golongan kurang mampu tetap dapat berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan.

“Ada berapa ribu BPJS Kesehatan masyarakat kita dinonaktifkan makanya kami terus berupaya mencapai pola pembiayaan BPJS Kesehatan nonaktif tersebut bisa kembali aktif,” tandas Sukma.

Salah satu upaya yang dilakukan ialah melibatkan pihak ketiga seperti perusahaan kelapa sawit melalui program CSR atau tanggung jawab sosial. (DY/RK/RF/AT/AP/Ata/X-5)



Sehubungan dengan rencana penggabungan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (“Askrindo Syariah” atau “Perseroan Penerima Penggabungan”) dan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (“Jamkrindo Syariah” atau “Perseroan Yang Menggabungkan Diri”) sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 27 Oktober 2026 (“Rancangan Penggabungan”) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”), maka dengan ini Direksi Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah, yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari masing-masing Dewan Komisaris, mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan sebagai berikut:

LATAR BELAKANG RENCANA PENGABUNGAN

Rencana penggabungan oleh Perseroan Penerima Penggabungan dan Perseroan Yang Menggabungkan Diri (“Penggabungan”) akan dilaksanakan oleh Direksi Perseroan Penerima Penggabungan bersama-sama dengan Direksi Perseroan Yang Menggabungkan Diri sebagai tidak lanjut dari arahan penataan (streamlining) bagi anak usaha BUMN Level 2 – Level 7 dari PT Danantara Asset Management (Persero) (“Danantara”) beserta arahan dari Direksi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (“IFG”) (arahannya sebagaimana tercantum dalam korespondensi terkait selanjutnya disebut sebagai “Arahan Streamlining Danantara dan IFG”).

INFORMASI MENGENAI MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGABUNGAN

Riwayat Singkat dan Kegiatan Usaha Masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH

Askrindo Syariah merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 45, tertanggal 29 November 2012, dibuat di hadapan Hadijah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-61610.AH.01.1.Tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0104523.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 3 Desember 2012, dan berdomisili di Jakarta Selatan, dan beralamat di Menara Utara Gedung Menara BPJAMSOSTEK, Lt. 19, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Anggaran Dasar Askrindo Syariah diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor 34 tertanggal 22 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Hadijah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0053391.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024, dan telah diterima sebagai pemberitahuan atas perubahan data perseroan sesuai dengan surat penerimaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0244140 tertanggal 26 Agustus 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0179148.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024.

Pada tanggal Ringkasan Rancangan Penggabungan ini, susunan permodalan Askrindo Syariah adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000
Modal Ditampakan	400.000	400.000.000.000
Modal Disetor	400.000	400.000.000.000
Nilai Nominal		1.000.000

Sesuai dengan susunan pemegang saham Askrindo Syariah adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	399.999	399.999.000.000	99,99
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo	1	1.000.000	0,01
Jumlah	400.000	400.000.000.000	100,00

Sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 3 Anggaran Dasar Askrindo Syariah, Askrindo Syariah merupakan perseroan yang bergerak di bidang penjaminan pembiayaan dengan prinsip syariah. Secara khusus, pada tahun buku yang sedang berjalan, Askrindo Syariah telah melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha utamanya yang meliputi penjaminan syariah yang seluruhnya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Tidak terdapat masalah di luar kegiatan usaha sehari-hari yang dihadapi oleh Askrindo Syariah yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Askrindo Syariah pada tahun buku berjalan.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

Jamkrindo Syariah merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 68, tertanggal 19 September 2014, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-26462.40.10.2014 tanggal 24 September 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098220.40.80.2014 tertanggal 24 September 2014, dan berdomisili di Jakarta Pusat, dan beralamat di Jl. Letjend Supratno No. 20 Blok AII/4, RT/6/RW.5, Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Anggaran Dasar Jamkrindo Syariah diubah terakhir kalinya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 6 tertanggal 14 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta dan telah diterima sebagai pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0092239 tanggal 15 Juli 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133748.AH.01.11.Tahun 2023 tertanggal 15 Juli 2023.

Pada tanggal Ringkasan Rancangan Penggabungan ini, susunan permodalan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditampakan	1.411.241	705.620.500.000	70,56
Modal Disetor	1.411.241	705.620.500.000	70,56
Nilai Nominal		500.000	

Sedangkan susunan pemegang saham Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)	1.410.241	705.120.500.000	99,93
Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera	1.000	500.000.000	0,07
Jumlah	1.411.241	705.620.500.000	100,00

Sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 3 Anggaran Dasar Jamkrindo Syariah, Jamkrindo Syariah merupakan perseroan yang bergerak di bidang penjaminan berdasarkan prinsip syariah. Secara khusus, pada tahun buku yang sedang berjalan, Jamkrindo Syariah telah melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha utamanya yaitu Perusahaan Penjaminan Syariah. Tidak terdapat masalah di luar kegiatan usaha sehari-hari yang dihadapi oleh Jamkrindo Syariah yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Jamkrindo Syariah pada tahun buku berjalan.

ALASAN DAN PENJELASAN DILAKSANKANNYA PENGABUNGAN

Dalam rangka menindaklanjuti Arahan Streamlining Danantara dan IFG dan sebagai perusahaan afiliasi yang beroperasi di bawah IFG Group, manajemen Perseroan Penerima Penggabungan dan Perseroan Yang Menggabungkan Diri menyadari potensi manfaat-manfaat yang diperoleh dengan menyatukan kegiatan usaha dalam rangka menciptakan sinergi bisnis yang solid dan menguatkan kapasitas permodalan. Pertimbangan-pertimbangan di atas mencakup:

Menyatukan Perseroan Penerima Penggabungan dan Perseroan Yang Menggabungkan Diri berpotensi meningkatkan aksesibilitas penjaminan syariah yang lebih inklusif dengan memastikan mekanisme dan kebijakan sesuai dengan nature-of-risk usaha penjaminan untuk meningkatkan fokus pengembangan dan accessibility penjaminan syariah.

Menyatukan Perseroan Penerima Penggabungan dan Perseroan Yang Menggabungkan Diri dapat mendorong kolaborasi dan memfasilitasi efisiensi antara kedua entitas yang merupakan anak usaha Badan Usaha Milik Negara dengan pangsa pasar terbesar untuk bersama-sama mendorong pertumbuhan industri penjaminan syariah.

Menyatukan Perseroan Penerima Penggabungan dan Perseroan Yang Menggabungkan Diri dapat menghasilkan praktik terbaik di industri penjaminan melalui penetapan standar terpadu pengelolaan risiko & peningkatan kualitas layanan yang berorientasi pada pelanggan, sehingga dapat memperbaiki proses Analisis Risiko Penjaminan, Analisis Kelayakan Terjamin/ Calon Terjamin (Akseptasi/klaim) dan memperkuat pelayanan, salah satunya melalui digitalisasi.

Menyatukan Perseroan Penerima Penggabungan dan Perseroan Yang Menggabungkan Diri dapat menghasilkan praktik terbaik di industri penjaminan melalui penetapan standar terpadu pengelolaan risiko & peningkatan kualitas layanan yang berorientasi pada pelanggan, sehingga dapat memperbaiki proses Analisis Risiko Penjaminan, Analisis Kelayakan Terjamin/ Calon Terjamin (Akseptasi/klaim) dan memperkuat pelayanan, salah satunya melalui digitalisasi.

Dengan memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia, serta Anggaran Dasar dari Perseroan Penerima Penggabungan dan Perseroan Yang Menggabungkan Diri, proses Penggabungan hanya dapat dilakukan setelah persyaratan-persyaratan berikut ini terpenuhi:

Persetujuan atas Rancangan Penggabungan oleh Dewan Komisaris Perseroan Penerima Penggabungan dan Perseroan Yang Menggabungkan Diri;

Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dalam 2 (dua) surat kabar berperedaran nasional, dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan Penerima Penggabungan dan Perseroan Yang Menggabungkan Diri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS masing-masing Perseroan Penerima Penggabungan dan Perseroan Yang Menggabungkan Diri;

Persetujuan atau tidak terdapatnya keberatan dari atau pemberitahuan kepada para kreditur dan pihak ketiga lainnya yang diperlukan untuk diperoleh berdasarkan perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh Perseroan Penerima Penggabungan dan Perseroan Yang Menggabungkan Diri;

Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana pelaksanaan Penggabungan, termasuk diperolehnya persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, serta anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perseroan Penerima Penggabungan;

Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Penerima Penggabungan dan Perseroan Yang Menggabungkan Diri yang dihadiri oleh setidaknya pemegang saham yang mewakili 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ada dan keputusan disetujui sekurangny 3/4 (tiga per empat) dari bagian jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat dengan tunduk pada ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar masing-masing yang berlaku;

Penandatanganan Akta Penggabungan, yang mana akan dilaksanakan setelah semua persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Penerima Penggabungan dan Perseroan Yang Menggabungkan Diri diperoleh; dan Diterimanya persetujuan atau diterimanya pemberitahuan atas Akta Perubahan Anggaran Dasar dari Perseroan Penerima Penggabungan dari Menteri Hukum Republik Indonesia.

KONVERSI SAHAM ATAS ENTITAS TERGABUNG TERHADAP SAHAM DALAM JPAS SEBAGAI PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGABUNGAN

Perhitungan konversi saham Perseroan Yang Menggabungkan Diri menjadi saham Perseroan Penerima Penggabungan dilakukan berdasarkan valuasi yang dilakukan oleh KJPP Ruky Safudin & Rekan selaku penilai independen sebagaimana termuat dalam Laporan Penilaian 100% Saham PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor 00044/2.0095-00/BS/09/0269/1/VI/2026 tanggal 2 Juni 2026 dan Laporan Penilaian 100% Saham PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 00045/2.0095-00/BS/09/0269/1/VI/2026 tanggal 2 Juni 2026, menggunakan pendekatan nilai pasar berdasarkan laporan keuangan masing-masing Perseroan Penerima Penggabungan dan Perseroan Yang Menggabungkan Diri berdasarkan tanggal 30 September 2025.

PENGUMUMAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGABUNGAN

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH DAN PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH (“RINGKASAN RANCANGAN PENGABUNGAN”)



Berdasarkan penilaian valuasi penggabungan tersebut, rasio penggabungan yang diperoleh adalah sekitar 1 (satu) lembar saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Yang Menggabungkan Diri akan dikonversikan menjadi 0,27 (nol koma dua tujuh) lembar saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Penerima Penggabungan, dengan ketentuan bahwa angka tersebut merupakan pembulatan penyebutan dan perhitungan konversi saham aktual akan mengacu pada rasio penuh yang tidak dibulatkan (yakni 0,265736962560703 (nol koma dua enam lima tujuh tiga enam sembilan enam dua lima enam nol tujuh nol tiga) untuk menghasilkan jumlah

saham baru sebagaimana dimaksud di bawah ini.

Perseroan Penerima Penggabungan akan menerbitkan saham baru kepada Pemegang Saham Perseroan Yang Menggabungkan Diri yang akan efektif menjadi pemegang saham Perseroan Penerima Penggabungan sejumlah 375.019 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan belas) lembar saham atau senilai Rp375.019.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar sembilan belas tiga Rupiah).

Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan Penerima Penggabungan

NERACA DAN LAPORAN RUGI LABA (LAPORAN KEUANGAN) Perseroan Penerima Penggabungan

Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan Penerima Penggabungan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021, 2022, 2023, 2024 dan 30 September 2025:

Laporan Posisi Keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2021 – 30 September 2025)					
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)					
	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	30 September 2025*
ASET					
Kas dan setara kas	22.305	58.110	41.147	23.869	31.020
Investasi	1.012.593	1.409.318	1.663.485	2.039.313	2.284.748
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000
Piutang imbal jasa kafalah	104.972	38.929	14.645	5.429	1.800
Piutang penjaminan ulang	65.098	51.238	57.800	43.219	54.764
Piutang hasil investasi	10.283	16.985	19.261	24.773	31.060
Piutang lain-lain	0	0	0	0	0
Biaya dibayar dimuka	1.125	1.416	491	1.325	9.950
Pajak dibayar dimuka	16.073	16.073	0	0	0
Pajak akuisisi yang ditangguhkan	40.493	44.810	38.177	34.781	34.981
Aset penjaminan ulang	337.678	525.061	609.933	682.327	720.586
Aset tetap	23.510	18.123	26.156	33.000	30.647
Aset tidak berwujud	560	401	3.554	2.909	2.245
Aset pajak tangguhan	3.854	7.501	12.717	13.873	13.873
Aset lain-lain	9.940	10.973	3.492	1.584	2.169
JUMLAH ASET	1.708.484	2.258.938	2.550.858	2.986.402	3.297.843
LIABILITAS					
Utang Klaim	8.834	280	1.552	125	166
Utang penjaminan ulang	39.577	72.344	35.008	35.820	35.861
Utang pajak	25.961	35.031	2.760	2.158	10.638
Estimasi Klaim	204.777	164.879	199.556	367.625	461.731
Imbal Jasa Kafalah Ditangguhkan	733.511	1.050.049	1.207.760	1.356.458	1.399.848
Pendapatan Komisi Ditangguhkan	71.827	124.558	137.799	137.381	133.212
Liabilitas imbalan kerja	0	0	89	134	134
Akrual dan utang lain-lain	119.123	118.167	99.406	90.141	104.664
JUMLAH LIABILITAS	1.203.610	1.565.308	1.683.930	1.989.842	2.146.254
EKUITAS					
Modal saham	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	(3.539)	(8.002)	(8.219)	(8.203)	(8.202)
(Kerugian)/Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Surat Berharga yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain, Setelah Pajak	1.382	(20.910)	(1.763)	(7.785)	12.262
Saldo Laba - Telah Ditetapkan Penggunaannya	75.540	75.540	322.542	476.910	476.910
Saldo Laba - Belum Ditetapkan Penggunaannya	31.491	247.002	154.368	135.638	270.619
JUMLAH EKUITAS	504.874	693.630	866.928	996.560	1.151.589
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.708.484	2.258.938	2.550.858	2.986.402	3.297.843

*Laporan Keuangan per September 2025 merupakan cut-off date yang digunakan untuk menentukan valuasi dan penyusunan neraca pro forma, sehingga Laporan Keuangan yang telah diaudit per 31 Desember 2025 tidak dicantumkan.

Laporan Laba Rugi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2021 – 30 September 2025)

(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)					
	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	YTD2025*
Pendapatan Kafalah	459.355	445.729	358.947	436.599	366.700
Beban Kafalah	(151.100)	(99.710)	(134.640)	(239.927)	(189.072)
Labas Kotor/(Rugi) marjin Laba Kotor (%)	308.255	346.019	224.307	196.672	177.628
Beban Umum dan Administrasi	67%	78%	62%	45%	48%
Beban Lain-lain	(20.903)	(6.919)	(8.611)	(15.407)	(14.201)
Labas Sebelum Zakat, Pajak, Penyusutan, dan Amortisasi	233.397	287.388	196.880	177.200	175.272
EBITDA marjin (%)	51%	64%	55%	41%	48%
Depresiasi & Amortisasi	(11.093)	(13.857)	(10.837)	(12.514)	(11.069)
Labas Sebelum Zakat dan Pajak	222.304	273.531	185.943	164.686	164.203
Zakat	(5.558)	(8.838)	(4.649)	(4.117)	(4.105)
Labas Sebelum Pajak	216.746	266.693	181.294	160.569	160.098
Beban Pajak Kini	(40.848)	(53.505)	(32.081)	(24.935)	(26.272)
Beban/(Manfaat) Pajak Tangguhan	(6.598)	2.323	5.155	1.161	-
Labas Bersih / (Rugi Bersih)	169.300	215.511	154.368	136.795	133.826
marjin Laba Bersih (%)	37%	48%	43%	31%	36%

*Laporan Keuangan per September 2025 merupakan cut-off date yang digunakan untuk menentukan valuasi dan penyusunan neraca proforma, sehingga Laporan Keuangan yang telah diaudit per 31 Desember 2025 tidak dicantumkan.

Laporan Posisi Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2021 – 30 September 2025)

(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	30 September 2025*
ASET					
Kas dan setara kas	685.349	452.038	249.007	315.850	657.198
Investasi	282.270	459.697	601.852	617.120	625.879
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu	710.133	757.183	796.133	786.133	523.039
Piutang imbal jasa kafalah	106.504	53.067	9.402	16.492	33.013
Piutang penjaminan ulang	48.161	92.376	186.384	81.689	80.783
Piutang hasil investasi	5.703	8.183	10.041	10.278	8.908
Piutang lain-lain	237	157	78	761	42.312
Biaya dibayar dimuka	699	3.226	3.554	494	1.572
Pajak dibayar dimuka	-	-	50.415	64.212	10.547
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	89.013	70.889	55.531	45.431	18.386
Aset penjaminan ulang	426.201	428.727	354.324	321.817	318.203
Aset tetap	68.443	74.280	83.497	89.522	89.201
Aset tidak berwujud	636	482	340	3.270	2.945
Aset pajak tangguhan	42.233	49.147	51.537	55.366	46.252
Aset lain-lain	-	-	-	501	496
JUMLAH ASET	2.445.582	2.449.452	2.452.095	2.408.936	2.458.733
LIABILITAS					
Utang Klaim	22.611	5.456	5.110	1.530	2.621
Utang penjaminan ulang	55.555	48.315	53.857	16.916	22.043
Utang pajak	62.273	1.671	4.507	524	6.584
Estimasi Klaim	303.763	366.887	358.504	307.561	293.517
Imbal Jasa Kafalah Ditangguhkan	903.458	715.196	686.139	719.826	619.605
Pendapatan Komisi Ditangguhkan	42.981	42.863	30.573	27.941	19.138
Liabilitas imbalan kerja	3.995	6.241	6.137	6.242	6.493
Akrual dan utang lain-lain	73.899	116.998	113.147	123.887	122.717
JUMLAH LIABILITAS	1.468.535	1.303.627	1.257.974	1.622.427	1.092.718
EKUITAS					
Modal saham	705.620	705.620	705.620	705.620	705.621
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	424	(439)	450	1.179	-
(Kerugian)/Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Surat Berharga yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain, Setelah Pajak	6.003	(13.986)	(468)	(3.914)	14.324
Saldo Laba - Telah Ditetapkan Penggunaannya	96.843	265.000	454.630	488.519	539.889
Saldo Laba - Belum Ditetapkan Penggunaannya	168.157	189.630	33.889	54.105	106.182
JUMLAH EKUITAS	977.047	1.145.825	1.194.121	1.245.509	1.366.016
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.445.582	2.449.452	2.452.095	2.408.936	2.458.733

*Laporan Keuangan per September 2025 merupakan cut-off date yang digunakan untuk menentukan valuasi dan penyusunan neraca pro forma, sehingga Laporan Keuangan yang telah diaudit per 31 Desember 2025 tidak dicantumkan.

sebelum Penggabungan dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 127 ayat (6) dan ayat (7) UUP.

INFORMASI TERKAIT PERSEROAN YANG MENERIMA PENGABUNGAN

Anggaran Dasar Askrindo Syariah Selaku Perusahaan Yang Menerima Penggabungan

Perseroan Penerima Penggabungan berencana akan melakukan perubahan pada Anggaran Dasarnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pasal 1 terkait nama Perseroan Penerima Penggabungan dan Pasal 4 terkait permodalan untuk keperluan pelaksanaan Penggabungan ini. Hal ini disebabkan

Menimbang Kebijakan Tarif Wisata Ancol

- Perawatan dan pemeliharaan kawasan wisata harus tetap diperhitungkan.
- Keluhan dan tuntutan warga Jakarta jadi momentum evaluasi bersama.
- Pengeluaran dipastikan melonjak drastis apabila memboyong keluarga.

MOHAMAD FARHAN ZHUHRI
zhuhri@mediaindonesia.com

Tiket masuk ke kawasan wisata Ancol di Jakarta Utara tidak mungkin digratiskan untuk seluruh masyarakat. Hal itu sulit diwujudkan lantaran pemeliharaan dan perawatan fasilitas tempat rekreasi membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit.

Demikian penegasan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons tuntutan massa yang menggelar unjuk rasa di Balai Kota dan Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, terkait dengan permintaan akses gratis ke destinasi wisata pantai milik BUMD DKI tersebut.

Prinsipnya, perawatan dan pemeliharaan kawasan wisata harus tetap diperhitungkan agar pelayanan kepada pengunjung dapat berjalan. “Saya juga heran kalau ada permintaan untuk gratis bagi semua masyarakat. Ya enggak mungkinlah untuk dipenuhi, karena apa pun untuk merawat, memelihara, baik di Ancol maupun Ragunan (Taman Margasatwa Ragunan), memerlukan biaya,” ujar Pramono, seperti dikutip, kemarin.

Karena itu, kebijakan tiket gratis tetap diarahkan kepada kelompok penerima manfaat yang telah ditentukan pemerintah daerah setempat. Pemerintah Provinsi DKI juga mempertahankan skema tersebut sebagai bagian dari akses rekreasi bagi warga penerima bantuan pendidikan, tanpa mengabaikan kebutuhan pembiayaan pengelolaan kedua destinasi.

Pramono menekankan bahwa pemprov sebenarnya telah membebaskan biaya tiket masuk Ancol maupun Taman Margasatwa Ragunan bagi kelompok masyarakat tertentu, yakni para pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). “Ancol dan Ragunan itu gratis bagi anak-anak penerima KJP dan KJMU. Jadi, tidak gratis bagi semua,” ujarnya.

BIAYA WISATA KELUARGA

Sebelumnya, gelombang permintaan agar tiket masuk Ancol digratiskan disuarakan oleh kelompok massa yang mengatasnamakan Warga Jakarta Bersatu. Mereka mengeluhkan tingginya komponen biaya yang harus dikeluarkan warga saat hendak berekreasi ke Ancol.

Besaran biaya parkir dan tiket masuk per orang dinilai sangat memberatkan, terutama bagi keluarga berpenghasilan menengah ke bawah. Keluhan tersebut disampaikan langsung saat perwakilan warga melakukan audiensi dengan jajaran anggota DPRD DKI Jakarta pada Selasa (27/10).

Juru bicara Warga Jakarta Bersatu, Andi, memerinci bahwa tarif parkir kendaraan dan tiket masuk Ancol masing-masing memakan biaya Rp25.000. Artinya, untuk rombongan yang datang menggunakan kendaraan pribadi, sedikitnya harus merogoh kocek Rp50.000 hanya untuk akses awal, belum termasuk kebutuhan lainnya.

Pengeluaran tersebut dipastikan melonjak drastis apabila warga memboyong anggota keluarga. “Bagaimana kalau kita punya anak dua atau tiga, istri, bisa berlima, dikali Rp25.000 kan cukup lumayan. Jadi, uang untuk masuk Ancol harus buat masuknya *aja*,” ungkap Andi.

Perwakilan Warga Jakarta Bersatu lainnya, Novi, menambahkan bahwa tuntutan utama mereka ialah penggratiskan akses masuk kawasan pantai. Hal itu dinilai penting agar warga dari kalangan bawah memiliki alternatif hiburan yang terjangkau. “Kami tuntutan poin pertamanya memang tolong gratisikan untuk pengunjung Ancol. Karena kami butuh hiburan, terutama bagi warga menengah ke bawah, ya,” ucapnya.

Menurut Novi, keinginan warga



FOTO: FOTO: MI/USMAN ISKANDAR

PRAMONO TOLAK TUNTUTAN MASUK ANCOL GRATIS: Pengunjung menikmati keseruan bermain air di pantai Ancol, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Terkait dengan tuntutan massa aksi yang meminta tiket masuk ke kawasan wisata Ancol digratiskan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, kemarin, menyatakan bahwa permintaan tersebut tidak mungkin dipenuhi karena pengelolaan dan pemeliharaan kawasan wisata tersebut masih membutuhkan biaya besar.



mengakses Ancol secara cuma-cuma bukan sekadar untuk gaya hidup, melainkan kerinduan pada tempat rekreasi ruang terbuka yang ramah anak. “Hanya ingin *nikmatin, pengen ngerasain* nih angin malam di laut seperti apa. Main pasir apalagi kita yang punya anak kecil, ya. Main pasir tuh mereka sudah *happy*.”

TAMPUNG ASPIRASI

Kedatangan massa Warga Jakarta Bersatu di Gedung DPRD DKI Jakarta diterima langsung oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina bersama anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wa Ode Herlina memastikan pihak legislatif menampung seluruh masukan warga sebagai catatan penting yang akan dibawa ke rapat kerja Komisi B. Menurutnya, prinsip dasar pembangunan Jakarta tidak boleh mengesampingkan hak rekreasi warga kurang mampu.

“Kita tampung menjadi catatan penting ketika di rapat Komisi B. Pasti aspirasi mereka, ya, sangat betul, karena warga wajib menikmati kotanya. Harus bisa, Jakarta boleh modern, boleh makin terus jaya, makin terus keren, tapi enggak boleh *ninggalin* warga, terutama warga wong cilik, ya,” tegas Wa Ode.

Menggratiskan Tiket Bisa Picu Masalah Sampah

Ada potensi penurunan kualitas pelayanan dan kebersihan jika Ancol digratiskan tanpa pembatasan.

WACANA pembebasan biaya tiket masuk kawasan wisata Ancol bagi seluruh warga Jakarta dinilai kurang tepat. Disarankan agar kebijakan tersebut diterapkan secara selektif dengan memprioritaskan kelompok masyarakat tertentu, seperti warga kurang mampu, lansia, penerima bantuan sosial (bansos), pelajar, hingga pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Diah, 30, warga Jakarta Utara, menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya menerapkan skema yang serupa dengan program transportasi

publik gratis yang telah berjalan bagi kelompok penerima manfaat tertentu. Menurutnya, skema itu jauh lebih tepat sasaran karena tidak seluruh warga Jakarta membutuhkan pembebasan biaya rekreasi. “Bisa saja Pemprov DKI menggratiskan tiket Ancol, tapi baiknya untuk kelompok tertentu saja. Jadi, biar adil, warga-warga tertentu saja seperti warga kurang mampu, penerima bansos, pelajar, lansia, penerima KJP,” ujarnya kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Selain ketepatan sasaran, Diah juga menyoroti potensi penurunan kualitas pelayanan dan kebersihan jika Ancol digratiskan tanpa pembatasan. Lonjakan jumlah wisatawan dinilai berisiko menambah beban pengelolaan kawasan, terutama dalam menjaga kebersihan area pantai.

Ia menekankan bahwa peningkatan jumlah pengunjung harus diimbangi dengan kapasitas pengelola dalam menjaga kebersihan, keamanan, serta kenyamanan kawasan. Pemberian akses gratis bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan dinilai dapat menjadi jalan tengah (*win-win solution*) untuk memperluas akses rekreasi tanpa mengabaikan keberlanjutan pengelolaan kawasan wisata.

Pandangan senada disampaikan Rachma, 30, warga Jakarta Barat. Ia mengaku khawatir kawasan Ancol akan menjadi sangat padat, terutama pada musim liburan, jika tiket masuk dibebaskan untuk umum. “Oleh karena itu, dengan adanya tarif biar tidak terlalu sesak. Bayar *aja* ramai banget, apalagi nanti gratis,” ucap Rachma.

Rachma turut menyoroti isu kebersihan dan keamanan. Menurutny, kondisi yang terlalu padat justru akan mengurangi kenyamanan pengunjung. Ia menilai program promo yang kerap ditawarkan pengelola Ancol sebenarnya sudah cukup membantu masyarakat yang ingin berlibur hemat, seperti promo masuk gratis pada jam tertentu (pukul 16.00–23.00 WIB) hingga akhir Oktober 2026.

PENURUNAN KUALITAS

Rencana menggratiskan tiket masuk kawasan wisata Ancol bagi warga Jakarta juga memicu pro dan kontra di media sosial. Warganet ramai-ramai menyoroti persoalan kebersihan, ketertiban pengunjung, hingga efektivitas pengelolaan BUMD tersebut.

Dia menjelaskan pengelolaan Ancol sebenarnya sudah memiliki skema *corporate social responsibility* (CSR) yang menyediakan fasilitas akses gratis bagi kelompok masyarakat tertentu. Hanya saja, alokasi dan sosialisasi program tersebut dinilai belum terjangkau secara luas oleh publik.

Wa Ode berharap keluhan dan tuntutan warga ini menjadi momentum evaluasi bersama untuk memperluas jangkauan rekreasi inklusif di Ibu Kota. “Sebenarnya Ancol itu bagian dari CSR-nya sudah melakukan itu. Cuma mungkin keluarga kita ini enggak tahu, ya,” pungkasnya. (Ant/P-2)

Penolakan terhadap pembebasan tarif masuk umumnya dipicu oleh kekhawatiran atas lonjakan volume sampah dan kepadatan pengunjung. Sejumlah pihak menilai masalah kebersihan masih menjadi PR besar, meskipun saat ini pengunjung tetap dikenai biaya masuk.

Akun Threads @chawirisme, misalnya, mengaku khawatir kebijakan tiket gratis justru memicu penurunan kualitas kawasan wisata. Ia menyinggung banyaknya sampah berserakan saat akhir pekan meskipun pengunjung berkurang. ‘*Gak setuju kalo gratis, selama warganya gak bisa jaga ketertiban. Kalo weekend ke Ancol pasti keliatan bedanya, sampah keliatan*’ dibuang sembarangan. Ini padahal berbayar lho masuknya. *Gak* khayang *kalo* dikasih gratis’, tulisnya. (Far/P-2)

KEHILANGAN

BPKB B1280PQH Toyota Fortuner 2012

Silinder 02494 HilanMetAn.Pemkab.Halmahera

Selatan Jl.Cempaka Tengah 26E No.2 JakPus

MENCARI BAPAK KAMANDI

Bapak Kamandi, silakan hubungi Msi. Winnie XIONG, seorang pekerja sosial dari International Social Service Hong Kong, melalui Whatsapp di +852 5532 5025 atau email di winnie.xiong@issnhk.org untuk membahas rencana kesejahteraan seorang anak, Siti Palimah Ahmad Yazidi, yang lahir di Hong Kong pada tanggal 21 Oktober 2023.



PENGUMUMAN DAFTAR PEMBAGIAN HARTA PAILIT TAHAP VI PT ANUGERAH SURYO PROPERTINDO (DALAM PAILIT)

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 23/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Nomor: 53/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 27 Juni 2024, dan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 23/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Jo. Nomor: 53/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 26 Oktober 2026, dan sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kami Tim Kurator PT Anugerah Suryo Propertindo (Dalam Pailit) mengumumkan kepada para Kreditor PT Anugerah Suryo Propertindo (Dalam Pailit) dan pihak-pihak lain yang berkepentingan bahwa Kami telah menyediakan Daftar Pembagian Harta Pailit Tahap VI/PT Anugerah Suryo Propertindo (Dalam Pailit) tertanggal 23 Oktober 2026 di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jika tidak ada keberatan dari para Kreditor dan/atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam kurun waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, maka Kami akan melaksanakan pembagian sebagaimana diatur dalam Daftar Pembagian tersebut.

Jakarta, 29 Oktober 2026

TIM KURATOR PT ANUGERAH SURYO PROPERTINDO (DALAM PAILIT)

TARSISIUS AGUSTO NAUR, S.H. CLAUDIA TREVENA, S.H. PEBRI KURNIAWAN, S.H., M.H.



TIPUAN HOAKS BERTEBARAN Sudahkah kenali pilihan Anda?

MediaIndonesia.com Hadir dengan opini cerdas dan terverifikasi. Nudiri diases dan semua informasi berakutitas ada di genggaman Anda

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, serta menunjuk Pelaksanaan Lelang sebelumnya pada tanggal 9 September 2026 dan Pengumuman Kedua yang terbit di Surat Kabar Harian Media Indonesia tanggal 26 Agustus 2026, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Jawa Barat berkedudukan di Jalan Raya Buah Batu No. 194 Kota Bandung Jawa Barat, akan melakukan pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dengan penantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKN) Bekasi, terhadap barang jaminan 1 (satu) debitor sebagai berikut:

- Wandi Koswara
Sebidang tanah seluas 84 M2, sesuai SHM No 9369 atas nama Wandi Koswara, berikut dengan bangunan dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, terletak di Blok/No. Kav. B-1 Desa/Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Atau selengkap dikenal dengan Perumahan Dabuk Residence, Blok B No. 1 Jalan Bulak Tinggi V. Desa/Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
Harga Limit Sebesar Rp. 592.410.000,- dan Uang Jaminan Sebesar Rp 59.241.000,-

Pelaksanaan Lelang	Keterangan
Cara Penawaran : Open Bidding (melalui internet) Hari, Tanggal : Kamis 5 November 2026 Waktu Penawaran: Sejak ditayangkan pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran Batas Akhir Penawaran : Batas Akhir Penawaran: 5 November 2026, pukul 11.00 Waktu Server (WIB)	- Nominal uang jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) masing-masing peserta lelang harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan. - Setiap peserta lelang dapat melihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan dan jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKN, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. - Segala biaya yang timbul akibat mekanisme pertanahan menjadi beban peserta lelang.

Syarat-syarat lelang:
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website https://lelang.go.id - Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan Panduan Penggunaan".
2. Objek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/ penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/ peminal lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKN, Bekasi dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Wilayah Jawa Barat
3. Peserta lelang dapat melihat barang yang diilang sejak pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Informasi lebih lanjut tentang aset dan persyaratan lelang dapat menghubungi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Wilayah Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Jalan Raya Buah Batu No. 194 Kota Bandung Jawa Barat pada jam kerja dengan No. Telp. 085921064159 dan KPKN, Bekasi (021) 8508988 atau website www.rumahmurahbhn.com



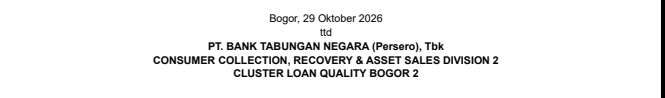
PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cluster Loan Quality Bogor 2 akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKN) Bogor, terhadap debitor sebagai berikut:

• Sebidang tanah berikut bangunan yang berdi di atasnya sesuai SHM No. 1019/luw luas tanah 72 m2 terletak di Blok. H.7 No. 17, Desa/ Kelurahan hwi, Kecamatan Plering, Kabupaten Plering, Provinsi Jawa Barat selengkap dikenal dengan Perumahan Grand Data City South Of Jakarta Cluster Cascade Blok. H.7 No. 17, Desa/Kelurahan hwi, Kecamatan Plering, Kabupaten Plering, Provinsi Jawa Barat
(Limit Rp 711.540.000,-; Jaminan Rp 142.308.000,-)

Pelaksanaan Lelang:	Cara Penawaran
Waktu Penawaran	Waktu Penawaran
Batas Akhir Penawaran	Batas Akhir Penawaran
Penetapan Pemegang Lelang	Penetapan Pemegang Lelang
Pelaksanaan Harga Lelang	Pelaksanaan Harga Lelang
Bea Lelang Pembeli	Bea Lelang Pembeli
PPN	PPN
Tempat Pelaksanaan Lelang	Tempat Pelaksanaan Lelang

Persyaratan Lelang:
1. Penawaran Lelang dilakukan terapa kehadiran peserta lelang (e-auction) dengan penawaran terbuka (open bidding) yang ditayangkan pada Aplikasi Lelang Internet pada alamat domain https://lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada www.bit.ly/caraikutilelang dan "Syarat & Ketentuan" pada domain www.lelang.go.id.
2. Calon Peserta Lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dengan menandatangani diri dan mengikatkan akun pada Aplikasi pada alamat diatas, dengan meremark soft copy (scan) KTP, NPWP, Perusahaan dalam 1 file.
3. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman ini dan disetor sekaligus (bukan dicicil) serta harus efektif diterima KPKN, Bogor paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
4. Uang jaminan harus disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
5. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is). Peserta lelang dapat melihat barang yang diilang sejak pengumuman ini terbit. Info dapat menghubungi BTN Cluster Loan Quality Bogor 2 - Kantor Cabang Pembantu Dramaga Telp. (0251) 8624179, atau HP. Panca Satuhu BBH (0811-6040-304).



BANK INDONESIA

PENGUMUMAN TENDER
No.28/47/DMAP-GPPS-PBS/PENG/B tanggal 28 Oktober 2026

Bank Indonesia akan melaksanakan **Tender Pengadaan Pelaksana Pekerjaan/Pengantar Peralatan Mekanikal dan Elektrikal di Gedung Tipikal KOPERBI Thamnir** dengan nomor Pengadaan RFQ: 58025, melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia (<https://eprocurement.bi.go.id>), dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Ruang lingkup Pekerjaan meliputi:

1. Pekerjaan persiapan;
2. Pekerjaan listrik kuat arus;
3. Pekerjaan penangkal petir;
4. Pekerjaan fire alarm;
5. Pekerjaan sound system (public address);
6. Pekerjaan Building Automation System (BAS);
7. Pekerjaan plumbing;
8. Pekerjaan fire hydrant;
9. Pekerjaan tata udara;
10. Pekerjaan fire stop;
11. Pengujian dan Commissioning;
12. Pengurusan Perizinan dan Kepatuhan Teknis; dan
13. Dokumentasi dan Pelaporan Pekerjaan.

II. Pagu anggaran sejumlah **Rp11.780.518.395,34 (sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga lima ratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh empat sen)** sudah termasuk PPN (21%/11,12).

III. Persyaratan Peserta Tender:

1. Peserta Tunggal berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Terdapat sebagai rekanan Bank Indonesia pada aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia.
3. Perusahaan yang bergerak di bidang Konstruksi dan memiliki Sertifikasi Badan Usaha yang telah terakreditasi/dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)/Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang masih berlaku sebagai berikut:

Kode Klasifikasi	Klasifikasi	Kualifikasi
IN006	Instalasi Elektronika	-
	atau	
EL010	Instalasi Listrik Gedung dan Pabrik	-
	atau	
SBUIPTL	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	Minimal Menengah

Dalam hal sertifikasi dalam proses perpanjangan, calon Peserta Pengadaan harus menyampaikan tanda terima/bukti pengurusan perpanjangan dari LPJK/LSBU yang sedang mengulangi sertifikasi.

4. Perusahaan dalam waktu lima tahun terakhir (Oktober 2021 s.d. Oktober 2026) memiliki pengalaman pekerjaan mekanikal dan elektrikal atau pekerjaan konstruksi yang di dalamnya terdapat lingkup mekanikal dan elektrikal untuk Gedung Kantor/Rumah Saki/Komersial/Apartemen/Mali yang telah selesai, dengan nilai kontrak minimal sejumlah Rp3.926.839.465,11 dalam 1 (satu) kontrak. Pengalaman dibuktikan dengan:
 - a) Surat Perintah Kerja (SPK)/Perjanjian/Purchase Order (PO); dan
 - b) Berita Acara Serah Terima (BAST 1) Pekerjaan/dokumen sejenis yang membuktikan Pekerjaan telah selesai.
 Dalam hal ini yang dimaksud dengan objek dari pengalaman di atas adalah sebagai berikut:
 - a) Gedung Kantor yang gedung yang fungsi utamanya digunakan untuk kegiatan perkantoran, administrasi, manajemen, dan/atau kegiatan profesional;
 - b) Gedung Komersial seperti gedung perdagangan, industri, hotel, toko atau rumah toko;
 - c) Gedung Apartemen adalah bangunan bertingkat yang terdiri atas unit-unit hunian terpisah, dilengkapi fasilitas dan sistem utilitas bersama, serta dikelola sebagai satu kesatuan bangunan atau Kawasan. Bangunan Apartemen yang dimaksud dalam hal ini adalah Rumah Susun Komersial dan/atau Rumah Susun Negara (tidak termasuk Rusunami, Rusunawa, Rusun Khusus).
5. Menelaik Laporan Keuangan Tahun 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal Wajar dengan Pengecualian.
6. Telah memenuhi kewajiban perpajakan Tahun 2025 dengan menyampaikan paling kurang bukti penerimaan atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak (DJP).
7. Dalam hal pernah melaksanakan pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME) di Bank Indonesia, tidak pernah memiliki penilaian kinerja perusahaan yang kurang baik dari Bank Indonesia dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (Oktober 2024 s.d. Oktober 2025):
 - *) Bagi calon Peserta yang akan melakukan pendaftaran Tender dan pernah melaksanakan kontrak pekerjaan ME di Bank Indonesia agar dapat melakukan pengecekan penilaian kinerja perusahaan melalui alamat e-mail: Helpdesk-rekanan@bi.go.id.
8. Menyampaikan Surat Pernyataan bermeterai sebagai berikut:
 - a) Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
 - b) Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
 - c) Orang yang berwenang mewakili Badan Usaha tidak sedang menjerakanisasi saki pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - d) Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan Pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
 - e) Tidak memiliki hubungan dengan peserta lain yang ikut pada pengadaan ini dalam bentuk kesamaan kepemilikan dan kepemilikan; dan
 - f) Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi *E-Procurement* adalah benar dan merupakan copy dokumen asli.
 *) Larangan afiliasi kepemilikan tidak berlaku bagi BUMN, BUMD, atau badan usaha yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia.

IV. Persyaratan pendaftaran:

1. Calon Peserta harus terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia melalui <https://eprocurement.bi.go.id>.
2. Syarat dan ketentuan calon Peserta lebih rinci dapat di akses melalui <https://www.bi.go.id/id/layanan/lelang-jasa-barang/default.aspx> atau <https://eprocurement.bi.go.id>.
3. Pendaftaran calon Peserta dimulai sejak tanggal **29 Oktober s.d. 5 November 2026** melalui <https://eprocurement.bi.go.id>.
4. Hanya perusahaan yang mendaftar dan telah mengunggah dokumen pendaftaran calon Peserta Tender secara lengkap serta memenuhi persyaratan minimal aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia yang akan dikevaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses Tender.
5. Dalam hal calon Peserta memenuhi kendala selama mengunggah dokumen pendaftaran, agar menghubungi petugas Helpdesk-E-Procurement pada nomor telepon (021) 2981 8551, (021) 2981 6272, (021) 2981 6889 dan (021) 2981 2756 atau melalui alamat e-mail: Helpdesk-rekanan@bi.go.id.

V. Komitmen Integritas Pengadaan:

1. Pelaksanaan Pengadaan tunduk pada ketentuan Pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Tender.
2. Pengadaan di Bank Indonesia menjunjung tinggi prinsip anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta gratifikasi. Panitia pengadaan dan Peserta Tender wajib mematuhi komitmen ini.
3. Bank Indonesia tidak memungut biaya apapun dari setiap proses Pengadaan.
4. Dalam hal terdapat hal-hal yang bertentangan dengan komitmen tersebut, harap segera melaporkan melalui *whistleblowing system* Bank Indonesia melalui https://www.bi.go.id/wbsb/add_wbs2.aspx.

Scan QR Code untuk melihat syarat pendaftaran.

PANITIA TENDER

Di Tengah Tekanan, Kredit Bank Melaju

- Pendorong utama pertumbuhan berasal dari kredit investasi yang tumbuh 23,20%, diikuti kredit modal kerja sebesar 11,89%.
- Fasilitas kredit yang belum ditarik debitur masih cukup besar, mencapai Rp2.562,57 triliun, atau 21,70% dari total plafon.
- Penyaluran kredit BNI tumbuh 22,2% (yoy) menjadi Rp992,5 triliun, dengan distribusi yang merata di semua segmen.

IHFA FIRDAUSYA
ihfa@mediaindonesia.com

CHIEF Economist Permata Bank Josua Pardede menyebut kredit perbankan tetap tumbuh tinggi hingga kuartal III 2026 di tengah situasi ekonomi yang masih menantang. Hingga September 2026, kredit perbankan tumbuh 13,26% secara tahunan (yoy), sedikit melambat dari 13,65% pada Agustus.

“Pertumbuhan kredit perbankan tetap tinggi di tengah tekanan ekonomi. Ini menunjukkan aktivitas investasi dan kebutuhan pembiayaan sektor usaha masih relatif kuat. Namun demikian, pemulih ekonomi masih belum merata,” ujarnya, kemarin.

Apabila dilihat berdasarkan penggunaannya, kata Josua, pendorong utama pertumbuhan berasal dari kredit investasi yang tumbuh 23,20%, diikuti kredit modal kerja sebesar 11,89%, sementara kredit konsumsi hanya tumbuh 4,86%. Perbedaan tersebut menunjukkan ekspansi kredit lebih banyak ditopang kebutuhan pembiayaan korporasi dan investasi produktif ketimbang permintaan kredit rumah tangga.

KUALITAS KREDIT
Meski demikian, kata Josua, tingginya pertumbuhan kredit juga perlu dicermati dari sisi kualitas dan keberlanjutannya, terutama karena ekspansi pembiayaan belum diimbangi pertumbuhan pendanaan perbankan yang sebanding. Pada September, dana pi-

hak ketiga hanya tumbuh 8,22% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan kredit sebesar 13,26%. Selisih pertumbuhan tersebut berpotensi meningkatkan persaingan penghimpunan dana dan biaya pendanaan bank apabila berlangsung berkepanjangan. Sementara itu, fasilitas kredit yang belum ditarik debitur masih cukup besar, mencapai Rp2.562,57 triliun, atau 21,70% dari total plafon kredit yang tersedia. Kondisi itu menunjukkan ruang pembiayaan sebenarnya masih tersedia, tetapi pemanfaatannya tetap bergantung pada realisasi proyek, kebutuhan modal kerja, prospek permintaan, dan keyakinan dunia usaha.

KREDIT TUMBUH 22,2%

Pada kesempatan berbeda, PT Bank Negara Indonesia (BNI) membukukan laba operasional sebelum pencadangan atau *pre-provision operating profit* (PPOP) sebesar Rp27,5 triliun hingga kuartal III 2026, tumbuh 11,6% secara tahunan (yoy). Capaian tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah BNI untuk periode kuartal III, mencerminkan ketahanan fundamen perseroan di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan margin industri perbankan.

Direktur Utama BNI Putra Wahju Setyawan mengatakan kinerja tersebut didukung pertumbuhan kredit sebesar 22,2% (yoy) menjadi Rp992,5 triliun, dengan distribusi yang merata di semua segmen. Dana murah atau *current*



ANTARA/NOVA WAHYUDI

MAGANGHUB KEMENAKER BATCH TIGA DIBUKA: Warga mengakses informasi pendaftaran program pemagangan nasional (*Maganghub*) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 2026 *batch* tiga angkatan II di Palembang, Sumatra Selatan, kemarin. Pendaftaran yang dibuka pada 27 Oktober hingga 4 November 2026 melalui platform digital tersebut tidak dipungut biaya dan bertujuan memperluas kesempatan bagi calon tenaga kerja untuk memperoleh pengalaman di dunia kerja.

account savings account (CASA) juga tumbuh 19,6% (yoy) menjadi Rp733,7 triliun, sementara rasio kredit bermasalah atau *non-performing loan* (NPL) gross membaik menjadi 1,9%. “Di tengah dinamika pasar yang menantang, BNI tetap menjaga momentum pertumbuhan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan disiplin dalam pengelolaan risiko. Fokus kami adalah memperkuat fundamen dan produktivitas untuk menciptakan pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujarnya.

KREDIT SELEKTIF
Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena menambahkan, ekspansi kredit dilakukan secara selektif pada semua

segmen, dengan menerapkan standar analisis kelayakan kredit (*underwriting*) yang disiplin. Strategi tersebut mendorong pangsa pasar kredit BNI meningkat 113 basis poin (yoy) menjadi 10,6%. Dari sisi pendanaan, penguatan layanan perbankan transaksi melalui *Bnidirect* dan *Wondr by BNI* turut mendorong pertumbuhan CASA sebesar 19,6% (yoy) menjadi Rp733,7 triliun. Hingga September 2026, giro BNI tumbuh 25,9% (yoy), melampaui pertumbuhan industri sebesar 9,8% berdasarkan data Agustus 2026. Pangsa pasar giro meningkat 120 bps menjadi 13,2%, sementara pangsa pasar tabungan naik 10 bps menjadi 9,2%, didukung pertumbuhan tabungan BNI sebesar 11,6% (yoy). (Ins/E-1)

Kombinasi Tekanan Global dan Sentimen MSCI Bebani Rupiah

Pergerakan rupiah dan mata uang kawasan masih dipengaruhi ketidakpastian penyelesaian konflik di Timur Tengah.

TEKANAN eksternal dan sentimen domestik terkait dengan potensi penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI masih menjadi beban pergerakan rupiah yang kian mendekati 18.200 per US\$.

Dalam penutupan perdagangan kemarin sore, nilai tukar rupiah bergerak melemah 28 poin, atau 0,15%, menjadi 18.184 per US\$ jika dibandingkan dengan penutupan sebelumnya di level 18.156 per US\$. Kurs rupiah *Jakarta interbank spot dollar rate* (Jisdor) Bank Indonesia juga bergerak melemah ke level 18.183 per US\$ dari sebelumnya 18.139 per US\$.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Erwin Gunawan Hutapea mengatakan pergerakan rupiah dan mata uang kawasan masih dipengaruhi ketidakpastian penyelesaian konflik di Timur Tengah. Kondisi tersebut menjaga harga minyak dunia tetap tinggi, di atas US\$115 per barel, sekaligus meningkatkan risiko fiskal ke depan.

“Sentimen *risk-off* yang memburuk mendorong penguatan dolar AS dan arus keluar dana dari pasar negara *emerging market*,” kata Erwin, kemarin.

Selain tekanan eksternal, kenaikan imbal hasil (*yield*) obligasi turut memengaruhi pergerakan pasar ke-

US\$146,3 miliar pada akhir September 2026.

SINYAL THE FED
Analisis mata uang sekaligus Direktur PT Trazze Andalan Futures Ibrahim Assuabi menyatakan pelemahan rupiah dipengaruhi serangan Ansa-rullah Yaman (Houthi) terhadap kilang minyak terbesar di Arab Saudi.

“Pihak berwenang Arab Saudi tidak segera mengon-firmasi serangan terhadap fasilitas dengan kapasitas 550 ribu barel per hari itu,” ucapnya, kemarin.

Serangan-serangan tersebut dinyatakan memicu kekhawatiran mengenai keamanan rute ekspor alternatif, terutama pada saat pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur vital bagi pasokan minyak global, masih sangat terganggu akibat konflik yang lebih luas yang melibatkan Iran.

Ibrahim menambahkan, para investor juga disebut tengah mencermati keputusan kebijakan Federal Reserve AS untuk mendapatkan sinyal mengenai prospek ekonomi dan permintaan bahan bakar. (Ins/Ant/E-1)

LENSA BISNIS

Bank Mandiri Taspen dan UI Teken Nota Kesepahaman, Perkuat Kolaborasi Perbankan dan Pendidikan

PT Bank Mandiri Taspen dan Universitas Indonesia (UI) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama di Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia, Depok, Rabu (28/10). Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara sektor perbankan dan pendidikan, mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, serta membuka peluang pengembangan layanan perbankan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Nota Kesepahaman Bersama ditandatangani oleh Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen, Panji Irawan, dan Rektor Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Transformasi & Pengembangan Usaha Bank Mandiri Taspen, Noer Fajriansyah, serta Regional CEO Region III, Erlinda Rusda, bersama jajaran Bank Mandiri Taspen. Dari pihak UI, hadir para wakil rektor dan kepala badan, para direktur di lingkungan Pusat Administrasi UI, serta para dekan fakultas. Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen, Panji Irawan, menyampaikan bahwa kolaborasi antara dunia perbankan dan pendidikan memiliki peluang besar untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Perguruan tinggi berperan dalam pengembangan pengetahuan, riset, inovasi, dan sumber daya manusia, sementara perbankan dapat mendukung akses terhadap layanan keuangan serta kesejahteraan masyarakat. “Kerja sama dengan Universitas Indonesia menjadi peluang bagi Bank Mandiri Taspen untuk memperluas manfaat layanan perbankan sekaligus membangun kolaborasi yang mendukung pengembangan sumber daya manusia. Kami berharap sinergi ini dapat diwujudkan melalui program-program konkret yang relevan dengan kebutuhan sivitas akademika dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Panji Irawan. Salah satu peluang yang dapat dikembangkan melalui kerja sama ini adalah layanan cash management, Kredit Mantap Pensiun–Pendidikan, serta tabungan persiapan pensiun bagi keluarga sivitas akademika. Kolaborasi juga berpotensi mencakup program pembekalan dan pelatihan purnabakti bagi dosen dan tenaga kependidikan, serta pendampingan kewirausahaan (*mentorship*) bagi pensiunan. Selain itu, pemanfaatan platform digital Movin dapat dijejaki untuk memperluas akses informasi mengenai program-program UI kepada nasabah Bank Mandiri Taspen. Berbagai inisiatif tersebut diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara layanan perbankan, kebutuhan pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Bagi Bank Mandiri Taspen, kerja sama ini juga sejalan dengan pengembangan *silver economy*, yakni penguatan peran dan potensi ekonomi masyarakat usia matang, termasuk mereka yang memasuki masa purnabakti. Melalui pendekatan tersebut, masa pensiun diharapkan tetap menjadi fase kehidupan yang produktif, mandiri, dan sejahtera. Bank Mandiri Taspen dan Universitas Indonesia berharap Nota Kesepahaman Bersama ini dapat ditindaklanjuti melalui program-program yang konkret, terukur, dan berkelanjutan, sehingga memberikan nilai tambah bagi kedua institusi serta masyarakat.



DOK MANDIRI



LPS
LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

PENGUMUMAN

PENG-58/GKLM/2026
PEMBAYARAN ATAS PENETAPAN STATUS PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH PENYIMPAN PT BPR CEPER PERMATA ARTHA (DL)

- Sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha **PT BPR Ceper Permata Artha (DL)**, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEPR-111/D.03/2026 tanggal 25 Juni 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Ceper Permata Artha, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan Simpanan yang layak dibayar dan Simpanan tidak layak dibayar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS (“UU LPS”) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”).
- Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dilakukan secara bertahap. Penentuan Simpanan yang layak dibayar dan Simpanan tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud diselesaikan paling lambat 90 hari kerja terhitung sejak izin usaha Bank dicabut atau sampai dengan tanggal **30 Oktober 2026**.
- Jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan oleh Nasabah Penyimpan dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak izin usaha Bank dicabut, yaitu s.d. tanggal **24 Juni 2031**.
- LPS telah menetapkan status penjaminan simpanan nasabah PT BPR Ceper Permata Artha (DL) yang diumumkan di kantor bank dan website LPS. Selanjutnya, syarat, dokumen, dan tata cara pembayaran dapat dilihat pada website LPS dengan akses website LPS di <https://www.lps.go.id/>.
- Pembayaran kelima klaim Penjaminan simpanan Nasabah Penyimpan PT BPR Ceper Permata Artha (DL) oleh Bank Pembayar dilakukan mulai **Kamis tanggal 29 Oktober 2026**.
- Pelayanan pengajuan klaim Penjaminan atau pembayaran simpanan yang telah dinyatakan status penjaminannya oleh LPS sebagai Simpanan layak dibayar dilaksanakan melalui: **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** selaku Bank Pembayar dengan alamat kantor pembayaran sebagai berikut:

Bank Pembayar	Alamat
Bank Mandiri KCP Delanggu	Jl. Raya Delanggu No. 55 A-B Gatak, Delanggu, Klaten, Jawa Tengah

- Nasabah penyimpan yang merasa keberatan terhadap keputusan penetapan status penjaminan simpanannya, dapat mengajukan keberatan kepada LPS melalui surat atau media lain yang ditetapkan LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak keputusan penetapan status penjaminan simpanan diumumkan, dalam hal ini batas waktu pengajuan keberatan nasabah yang diumumkan pada pembayaran kelima selambat-lambatnya tanggal **26 April 2027**. Adapun prosedur pengajuan keberatan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS dapat dilihat pada website LPS.
- Informasi lebih lanjut hubungi Pusat Layanan Informasi LPS, telepon: 154, WhatsApp: 0811 1154 154, atau email: informasi@lps.go.id.

Demikian agar maklum.

29 Oktober 2026
Direktur Group Kesekretariatan Lembaga



LPS
LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

PENGUMUMAN

NOMOR: PENG-59/GKLM/2026
TENTANG
PENGGAJUAN KEBERATAN NASABAH PENYIMPAN ATAS PENETAPAN STATUS PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH PT BPR CEPER PERMATA ARTHA (DL)

- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dalam hal nasabah penyimpan merasa keberatan terhadap keputusan penetapan status simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka nasabah penyimpan dimaksud dapat mengajukan keberatan kepada LPS.
- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), jangka waktu pengajuan keberatan kepada LPS oleh nasabah penyimpan yang didukung bukti nyata dan jelas dilakukan paling lambat 180 hari kalender sejak status penjaminan simpanan nasabah diumumkan LPS.
- Subhungan dengan butir 1 s.d. 2, batas waktu akhir pengajuan keberatan kepada LPS sebagai berikut:

PENGUMUMAN STATUS PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH	TANGGAL PENGUMUMAN	BATAS TERAKHIR PENGALUAN KEBERATAN
PENG-28/GKLM/2026	1 Juli 2026	27 Desember 2026
PENG-34/GKLM/2026	16 Juli 2026	11 Januari 2027
PENG-38/GKLM/2026	3 Agustus 2026	29 Januari 2027
PENG-52/GKLM/2026	14 Oktober 2026	11 April 2027
PENG-54/GKLM/2026	21 Oktober 2026	18 April 2027
PENG-58/GKLM/2026	29 Oktober 2026	26 April 2027

- Prosedur pengajuan keberatan nasabah penyimpan terdiri dari:
 - Nasabah penyimpan menyampaikan surat keberatan kepada LPS dengan melampirkan bukti nyata dan jelas sebagai dokumen pendukung.
 - LPS melakukan penelitian atas dokumen/bukti yang disampaikan nasabah penyimpan.
 - Dalam hal keberatan nasabah penyimpan diterima, LPS mengubah status simpanan menjadi simpanan layak dibayar.
 - Keputusan atas keberatan nasabah penyimpan ditetapkan oleh LPS.
- Surat keberatan ditujukan kepada:
Lembaga Penjamin Simpanan
Up.: Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank
Equity Tower Lt. 20-21, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190.
- Informasi dalam surat keberatan nasabah penyimpan dan dokumen yang dilampirkan terdiri atas:

No.	Informasi terkait Keberatan Nasabah Penyimpan
1.	Identitas nasabah (nama, alamat, pekerjaan, dan nomor telepon)
2.	Jenis simpanan (tabungan/deposito/giro)
3.	Nomor rekening simpanan
4.	Nominal simpanan yang diajukan
5.	Penjelasan atas keberatan yang diajukan oleh nasabah
6.	Permohonan nasabah atas keberatan yang diajukan oleh nasabah
7.	Lampiran: dokumen-dokumen yang disertakan bersamaan dengan surat keberatan
8.	Pernyataan nasabah atas kebenaran informasi dan dokumen yang diberikan
9.	Pernyataan nasabah bersedia memberikan bukti nyata dan jelas apabila terdapat permintaan informasi dan dokumen oleh LPS di dalam proses penanganan keberatan nasabah
10.	Tanda tangan nasabah

- Dokumen pendukung terkait dengan pengajuan keberatan, antara lain:

No.	Dokumen Pendukung terkait Keberatan Nasabah Penyimpan*
1.	Fotokopi identitas diri nasabah (KTP/SIM/Passpor)
2.	Salinan surat kuasa dan fotokopi identitas diri penerima kuasa apabila pengajuan keberatan diwakilkan oleh orang lain. Dalam hal simpanan yang diajukan keberatannya bersaldo nominal lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), surat kuasa dibuat dalam bentuk notariil atau dilegalisir oleh notaris
3.	Fotokopi bukti kepemilikan simpanan (buku tabungan/sertifikat deposito/bilyet giro)
4.	Fotokopi bukti setor yang sah
5.	Fotokopi bukti penerimaan bunga simpanan
6.	Fotokopi bukti pemenuhan kewajiban nasabah
7.	Fotokopi salinan putusan pengadilan
8.	Bukti pelaporan kepolisian (untuk nasabah yang simpanannya terkait pencairan sepihak oleh pengurus/pegawai bank sebelum bank dicabut izin usahanya)

Catatan: *) Untuk dokumen pendukung yang dilampirkan nomor 4 s.d. 8 bersifat opsional, dapat disesuaikan dengan permasalahan simpanan nasabah.

- Keberatan juga dapat diajukan dengan menggunakan aplikasi pada website LPS, dengan cara:
 - Akses halaman website LPS di <https://apps.lps.go.id/statussimpanan>
 - Pilih Bank PT BPR Ceper Permata Artha.
 - Masukan nomor rekening, lalu klik cari dan lihat status penjaminan simpanan.
 - Klik Ajukan Keberatan di bagian kanan bawah.
 - Lengkapi data pengajuan keberatan dan klik Submit.

Untuk informasi lebih lanjut, nasabah penyimpan dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi LPS, telepon: 154, WhatsApp: 0811 1154 154, atau email: informasi@lps.go.id.
Demikian agar maklum.

29 Oktober 2026
Direktur Group Kesekretariatan Lembaga

Perketat Pengawasan BBM Subsidi

- Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta menyita 1.110 liter, atau sekitar 1,1 kiloliter, solar bersubsidi.
- Pertamina Patra Niaga menghentikan penyaluran seluruh produk BBM ke SPBU 14.206.190 di Kecamatan Sei Bambi.
- Upaya pencegahan juga dilakukan melalui pengaturan pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung.

YOSE HENDRA
yose@mediaindonesia.com

KEPOLISIAN dan PT Pertamina Patra Niaga memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mencegah penyelewengan dan memastikan penyalurannya tepat sasaran.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatra Barat Kombes Siswanto mengatakan pengawasan di SPBU akan ditingkatkan melalui penempatan personel khusus dan patroli rutin. “Kami tidak ingin lengah. Pengawasan di SPBU harus ditingkatkan dengan menempatkan personel khusus dan menggelar patroli rutin,” kata Siswanto di Padang, Selasa (27/10).

Hal itu ditegaskan setelah Polda Sumatra Barat mengungkap 24 kasus dugaan penyelewengan BBM bersubsidi pada 19-26 Oktober 2026. Dalam penanganan perkara tersebut, polisi menetapkan 25 orang sebagai tersangka.

Menurut Siswanto, penyidik menemukan modus penyelewengan berupa pembelian BBM bersubsidi di SPBU untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Praktik tersebut tidak hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga menghambat masyarakat memperoleh BBM sesuai dengan peruntukannya.

PENINDAKAN

Penindakan juga dilakukan di Purwakarta, Jawa Barat. Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta menyita 1.110 liter, atau sekitar 1,1 kiloliter, solar bersubsidi yang diduga ditimbun. Polisi menangkap seorang pria berinisial AM, 43, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala Satreskrim Polres Purwakarta AK I Made Purwantara mengatakan petugas turut menyita satu pikap Mitsubishi Colt T120 SS 2008 beserta surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui pengaturan pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung.”



ANTARA /AKRAMUL MUMIL

PEMULIHAN AKSES: Pekerja mengoperasikan ekskavator untuk membuka kembali akses jalan lintas Peureulak, Aceh Timur–Pining, Gayo Lues, di Desa Lokop, Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur, Aceh, kemarin. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Aceh menangani sejumlah titik longsor akibat bencana hidrometeorologi pada 25 November 2025 di jalur tersebut. Penanganan meliputi perbaikan badan jalan yang terputus, pembersihan longsor, serta perbaikan saluran air di bahu jalan guna memulihkan konektivitas antarkabupaten, memperlancar mobilitas masyarakat, dan mendukung distribusi barang serta kebutuhan pokok ke wilayah terdampak.

Di Papua, Polda Papua menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam 15 kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi selama Januari–Oktober 2026. Perbuatan tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp429,48 juta.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Kombes Rama Samtama Putra mengatakan lima kasus ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, sedangkan 10 kasus lainnya ditangani jajaran kepolisian resor. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita 10.146 liter solar, 1.412 liter minyak tanah, dan 225 liter pertalite.

“Satgas Antimafia Migas terus bergerak melakukan upaya preemtif dan preventif terhadap penyalahgunaan BBM subsidi, serta melakukan penegakan hukum sesuai dengan arahan Kapolri,” kata Rama di Jayapura, Selasa (27/10).

SETOP PENYALURAN

Pertamina Patra Niaga menghentikan penyaluran seluruh produk BBM ke SPBU 14.206.190 di Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara. Kebijakan itu diambil setelah Polda Sumatra Utara menindak dugaan manipulasi takaran BBM di SPBU tersebut pada 20 Oktober.

Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara Fahrourgi Andriani Sumampouw menegaskan perusahaan tidak menoleransi penyimpangan yang merugikan konsumen. “Pertamina tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyimpangan yang merugikan konsumen,” ujarnya, kemarin.

PENGATURAN PEMBELIAN

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui pengaturan pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah kabupaten bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pertamina Patra Niaga, dan pengelola SPBU membahas langkah untuk mengatasi antrean sekaligus mencegah pembelian berulang yang berpotensi disalahgunakan.

Bupati Bangka Fery Insani mengatakan pembatasan pembelian menjadi salah satu solusi yang dipertimbangkan. Kebijakan itu akan disertai kewajiban menunjukkan STNK untuk memastikan pembelian sesuai dengan ketentuan.

Branch Manager Pertamina Patra Niaga Sumatra Bagian Selatan Sandy memastikan pasokan BBM bersubsidi di Bangka dalam kondisi aman dan mencukupi. Ia mengimbau masyarakat tidak membeli BBM bersubsidi untuk dijual kembali.

Di wilayah Sumba, Nusa Tenggara Timur, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus juga mengoptimalkan pasokan dan pelayanan melalui pengaturan penyaluran serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. (RZ/YP/RF/PO/Ant/E-2)



ANTARA /AHMAD SUBAIDI

KUNJUNGAN WISATAWAN: Pemandu wisata berbincang dengan wisatawan asing saat berkunjung ke Desa Wisata Adat Sade, Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), kemarin. Dua bulan pascakebakaran yang melanda desa wisata tersebut, sejumlah wisatawan mulai kembali berkunjung. Sementara itu, pembangunan kembali 75 rumah adat yang terbakar telah mencapai 55%, dengan 20 rumah di antaranya masih dalam proses pembangunan.

Pilkades Digital Sumedang Berjalan Lancar

Penerapan sistem digital secara menyeluruh menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa.

PEMERINTAH Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2026 dengan sistem digital di 92 desa berjalan lancar. Penerapan sistem tersebut mencakup 423 tempat pemungutan suara (TPS) dengan jumlah pemilih sekitar 270 ribu orang.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan seluruh desa yang menyelenggarakan pilkades tahun ini menggunakan sistem digital. Pemerintah daerah bersama berbagai unsur terkait memantau untuk memastikan proses pemungutan suara berlangsung tertib.

“Pilkades serentak 2026 di Sumedang yang diselengga-

rakan di 92 desa dengan 423 TPS berjalan lancar dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah,” kata Dony di Sumedang, kemarin.

Menurutnya, penerapan sistem digital secara menyeluruh menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa. Pemantauan di sejumlah lokasi juga menunjukkan pelaksanaan pemungutan suara berjalan sesuai dengan rencana.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memantau pelaksanaan pilkades di Desa Cibeureum Wetan, Kecamatan Cimalaka, menilai Sumedang berpotensi menjadi proyek percontohan bagi daerah lain.

Dedi mengatakan penerapan

pilkades digital sebelumnya telah dilakukan di Indramayu, Karawang, dan Bekasi. Namun, pelaksanaannya di daerah tersebut belum sepenuhnya menggunakan sistem digital.

“Sekitar dua minggu lalu, saya menelepon Bupati Sumedang dan meminta agar seluruh desa yang melaksanakan pilkades menggunakan sistem digital,” ujarnya.

Dedi menilai sistem digital memiliki sejumlah keunggulan, antara lain menekan biaya penyelenggaraan, mempercepat penghitungan suara, serta meminimalkan potensi kecurangan dalam pemungutan dan rekapitulasi suara.

Keberhasilan Sumedang diharapkan menjadi referensi bagi kabupaten lain yang akan menyelenggarakan pilkades. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga merencanakan penerapan sistem serupa di Kabupaten

Subang, Ciamis, dan Cianjur.

Meski demikian, pelaksanaan pilkades digital di Cianjur mengalami penundaan. Pemilihan yang semula dijadwalkan pada 18 Oktober 2026 diundur menjadi 8 November 2026.

Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur Dendi Renaldi mengatakan perubahan jadwal tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk kebutuhan penyelesaian dasar hukum pelaksanaan berupa peraturan bupati.

PENGAMANAN KETAT

Pengamanan pilkades serentak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, melibatkan 1.112 personel gabungan TNI dan Polri. Pengamanan disiapkan untuk pelaksanaan pemilihan pada 29 Oktober 2026 di 87 desa dengan 1.014 TPS.

Kepala Polresta Lombok Tengah Komisaris Besar Hariyanto mengatakan personel telah disiapkan berdasarkan pemetaan tingkat kerawanan di setiap TPS. (SG/BB/Ant/E-2)

PENGUMUMAN PELELANGAN
Nomor : 028.PLL/PST.PBJ-GDE/X/2026

No	Pekerjaan	No. RKS	Lokasi Kerja	Bidang/Sub Bidang	Biaya Penggantian Dokumen RKS
1	Jasa Managemen Service Fasilitas Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero)	RKS-114-PST/GDE/X/2026	Kantor Pusat, Jakarta	Teknologi Informasi, Telekomunikasi, dan Elektronika, Penyelesaian, Pengkalan, Pemeliharaan, dan Dukungan Teknis Peralatan Audio Visual dan Sistem Teleconference	Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)

PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)
Hari : Kamis, Jumat dan Senin
Tanggal : 28, 30 Oktober dan 2 November 2026
Waktu : 10:00 – 15:00 WIB
Metode : Email ke procurement@geodipa.co.id

SYARAT PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN RKS
1. Calon Peserta yang berminat mengikuti Pelelangan dapat mengirimkan email ke alamat procurement@geodipa.co.id untuk mendapatkan tata cara transfer penggantian dokumen RKS.
2. Mengirimkan scan KTP, surat kuasa bermaterai Rp10.000 dari pimpinan perusahaan (jika diwakilkan) dan bukti transfer biaya penggantian dokumen RKS melalui email ke procurement@geodipa.co.id

PERSYARATAN CALON PESERTA PENGADAAN
Pendaftaran Calon Peserta Pengadaan selanjutnya dan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS) dapat dilihat dan diunduh di www.geodipa.co.id pada bagian Procurement.

PARTISIPASI DAN INFORMASI LEBIH LANJUT
Calon Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan atau mengetahui informasi lebih lanjut dapat berkorespondensi melalui email: procurement@geodipa.co.id

Jakarta, 29 Oktober 2026
Panitia Pengadaan
PT Geo Dipa Energi (Persero)

INVITATION TO TENDER DEEPOCEAN INDONESIA

DeepOcean Indonesia invites qualified companies to participate in a tender process for the provision of:

- CUSTOMS BROKERAGE SERVICES**
Provision of customs brokerage services supporting:
 - Import & export
 - Temporary importation
 - Re-exportation
 - Declarations
 - Permits, and
 - Related customs clearance activities for offshore and marine projects in Indonesia.
- GENERAL AGENCY SERVICES**
Including:
 - Freight Forwarding & Project Logistics
 - Immigration & Work Permit Support
 - Vessel & Port Agency ServicesThe services will support offshore vessel operations, project mobilization and demobilization activities, crew changes, cargo logistics, regulatory coordination, and related operational requirements throughout Indonesia, including remote locations.

ELIGIBILITY REQUIREMENTS

- Valid Indonesian business licenses relevant to the services offered.
- Proven experience in offshore, marine, logistics, agency, or energy-related projects.
- Adequate operational capability and geographic coverage within Indonesia.
- Compliance with applicable Indonesian laws and regulations.
- Commitment to transparency, integrity, and ethical business practices.

REGISTRATION OF INTEREST
Interested companies are requested to submit:

- Company Profile
- Business Licenses and Registrations
- Relevant Experience Details
- Declarations
- Contact Person Information

DeepOcean Indonesia
Email: office@deepoceanigroup.com
Registration Deadline: 06 November 2026

DeepOcean reserves the right to accept or reject any application and is not obliged to accept the lowest-priced or any submission received. Participation in this tender process does not create any contractual commitment on the part of DeepOcean.

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penarikan Karatan Kelayakan Negara dan Lelang (KPNL) Jakarta I dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik Debitur atas nama :

SRIMIDA SARI
1 (satu) bidang tanah berhuruf bangunan ditetapiya, sesuai SHM No. 2222 atas nama Nyonya Jandis SRIMIDA SARI dengan luas tanah 43 m² terletak di RT. 013/RW. 002, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta (sesuai sertifikat) (selampit dikenal dengan L. Kebon Bawang XVI No. 62C RT. 013/RW. 002), Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta.

(Harga Limit Rp. 117.283.400,-; Setoran Jaminan Rp. 12.000.000)

Pelaksanaan Lelang :
Hari : Kamis
Tanggal : 12 November 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 12 November 2026 pukul 11:20 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kelayakan Negara dan Lelang Jakarta I
Jalan Pagiuri KKO Usman Dan Harun No. 10 Jakarta
Penetapan Pemegang : Jelaskan batas akhir penawaran

Peserta lelang diharang menyelesaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.

Deskripsi Persyaratan Lelang :
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang diakses pada alamat domain lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (file ekstensi .jpg/png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa bermaterai cukup dari Direktur / Direktur Utama/Komisaris, identitas pemberi dan penerima kuasa : NB dan NPWP perusahaan ; Anggaran dasar perusahaan dan perubahannya diunggah dalam 1 file.
3. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan Uang Jaminan Lelang melalui Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang dan sudah harus efektif paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Nomor Virtual Account (VA) akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang.
4. Obyek lelang dijual apa adanya (as is) dan Peserta Lelang dapat melihat Obyek Lelang sejak pengumuman ini sampai dengan hari pelaksanaan lelang.
5. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang yang terbentuk dan bes lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan lelang, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang tidak bisa dimintakan kembali dan akan disetor ke Kas Negara untuk dicatatkan sebagai penempatan lain-lain.
6. Penang lelang akan diumumkan lewat email masing-masing peserta.
7. Penang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 % dari nilai lelang yang wajib disetor ke rekening penampung Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
8. Kelerangan lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Retail Asset Management III Jakarta 1 Telp. (021) 34023002 atau KPNL Jakarta 1 Telp. (021) 3440209.

Jakarta, 29 Oktober 2026
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Retail Asset Management III / Jakarta 1

KPNL Jakarta I

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk pelaksanaan lelang tanggal 15 September 2026, dan Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang diumumkan di koran Media Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2026, berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan lelang ulang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penarikan Kantor Pelayanan Kelayakan Negara dan Lelang (KPNL) Jakarta I dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik Debitur atas nama :

CV. CAHAYA GEMILANG
1 (satu) bidang tanah berhuruf bangunan ditetapiya sesuai SHM No.495 atas nama MOH GHOLAZI, Sarjana Hukum dengan luas tanah 143 m² terletak di J. Sawah Baru No. 10 RT. 002 / RW. 011, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Kotamadya Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta (sesuai sertifikat), (selampit dikenal dengan Jalan Sawah Baru No. 10 RT. 002/RW. 011), Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta.

(Harga Limit Rp. 695.000.000,-; Setoran Jaminan Rp. 139.000.000)

Pelaksanaan Lelang :
Hari : Kamis
Tanggal : 12 November 2026
Waktu penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 12 November 2026 pukul 10:30 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kelayakan Negara dan Lelang Jakarta I
Jalan Pagiuri KKO Usman Dan Harun No. 10 Jakarta
Penetapan Pemegang : Jelaskan batas akhir penawaran

Peserta lelang diharang menyelesaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.

Deskripsi Persyaratan Lelang :
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang diakses pada alamat domain lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (file ekstensi .jpg/png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa bermaterai cukup dari Direktur / Direktur Utama/Komisaris, identitas pemberi dan penerima kuasa : NB dan NPWP perusahaan ; Anggaran dasar perusahaan dan perubahannya diunggah dalam 1 file.
3. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan Uang Jaminan Lelang melalui Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang dan sudah harus efektif paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Nomor Virtual Account (VA) akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang.
4. Obyek lelang dijual apa adanya (as is) dan peserta lelang diharang dapat melihat dan mengetahui objek yang akan ditawarkan, dan dianggap dengan sungguh-sungguh telah mengetahui segala bentuk kekurangan berikut semua perkara yang ada, sehingga apabila terjadi gugatan, tuntutan pembatalan/pengunduran pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut di atas, pihak yang berkepentingan/peserta lelang tidak dipertentahkan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan KPNL Jakarta I. Peserta Lelang dapat melihat Obyek Lelang sejak pengumuman ini sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
5. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang yang terbentuk dan bes lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang tidak bisa dimintakan kembali dan akan disetor ke Kas Negara untuk dicatatkan sebagai penempatan lain-lain.
6. Penang lelang akan diumumkan lewat email masing-masing peserta.
7. Penang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 % dari nilai lelang yang wajib disetor ke rekening penampung Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
8. Kelerangan lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Special Asset Management Jakarta Kota Telp. (021) 34023002 atau KPNL Jakarta 1 Telp. (021) 3440209.

Jakarta, 29 Oktober 2026
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Regional Special Asset Management Jakarta Kota

KPNL Jakarta I

Kejutan Klub Kecil kembali Terjadi

- Fleetwood yang bermain di divisi empat mampu menumbangkan Arsenal.
- Beberapa klub besar tercatat pernah dipermalukan klub kasta bawah.
- Everton dan Newcastle akan memperebutkan tempat di babak kelima.

DHIKA KUSUMA WINATA
dhika@mediaindonesia.com

ARSENAL mengalami salah satu kekalahan paling mengecewakan setelah disingkirkan Fleetwood Town pada putaran keempat Piala Liga Inggris, kemarin WIB. Hasil tersebut kembali memperlihatkan sulitnya memprediksi hasil Piala Liga.

Skuat asuhan Mikel Arteta secara mengejutkan harus mengakui keunggulan Fleetwood melalui adu penalti dengan skor 3-5 setelah kedua tim bermain imbang 1-1 selama waktu normal. Fleetwood, yang terpaut 84 tingkat dalam sistem kompetisi Inggris, memastikan kemenangan melalui tendangan penalti Conor Haughey.

Kekalahan itu juga tidak terlepas dari keputusan Arteta melakukan rotasi besar-besaran. Ia mengubah sembilan pemain dalam susunan tim, dengan mempertimbangkan pertandingan Liga Primer Inggris melawan Liverpool akhir pekan ini. Strategi tersebut justru berujung pada tersingkirnya Arsenal dari Piala Liga.

Tuan rumah lebih dahulu unggul lewat Aaron Loupalo-Bi sebelum Viktor Gyokeres menyamakan kedudukan bagi Arsenal. Meski mendominasi penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang, Arsenal gagal menambah gol. Bruno Guimaraes juga gagal menjalankan tugasnya dalam adu penalti setelah tembakannya ditepis kiper Jay Lynch.

Arteta mengakui hasil tersebut menjadi momen menyedihkan bagi timnya. Ia juga menyoroti kegagalan memaksimalkan peluang meski para pemain tetap menunjukkan determinasi, termasuk setelah gelandangnya, yakni Max Dowman, menerima kartu merah.

“Pertama-tama, selamat kepada Fleetwood yang berhasil melaju ke babak berikutnya. Cara mereka meraih kemenangan ini membuat hari ini menjadi hari yang sangat menyedihkan bagi kami,” kata Arteta.

Pelatih Fleetwood Matt Lawlor menyebut kemenangan itu sebagai pencapaian bersejarah bagi klubnya.

“Saya benar-benar tidak percaya. Ini malam terbesar dalam sejarah klub jika melihat lawan yang datang ke sini. Kami berhasil mengalahkan sang juara,” kata Lawlor.

SEJARAH TERULANG

Bagi klub elite seperti Arsenal, kalah dari klub kecil sudah pernah terjadi beberapa kali sebelumnya. Status dan kualitas pemain tidak selalu menjamin kemenangan. Bagi klub kecil, kompetisi seperti Piala Liga menjadi kesempatan untuk mencatatkan sejarah.

Arsenal juga pernah disingkirkan Wrexham dengan skor 1-2 pada Piala FA 1992. Kejutan lain terjadi pada 2015 ketika Bradford City membalikkan keteringgalan dua gol

untuk mengalahkan Chelsea 4-2 di Stamford Bridge.

Pada 1972, Hereford United menumbangkan Newcastle United 2-1 melalui gol Ronnie Radford dan Ricky George. Wimbledon juga mencatat sejarah pada final Piala FA 1988 dengan mengalahkan Liverpool 1-0 lewat sundulan Lawrie Sanchez. Sementara itu, Grimsby Town menyingkirkan Manchester United melalui adu penalti 12-11 pada Piala Liga 2025 setelah bermain imbang 2-2.

“The Magpies’ juga memiliki ambisi besar di Piala Liga setelah menjuarai kompetisi tersebut pada musim 2024. Sejak musim 2022-2023, Newcastle telah memenangi 18 pertandingan Piala Liga, terbanyak jika dibandingkan dengan tim lain.”

EVERTON BERUSAHA BANGKIT

Dini hari nanti, Everton akan menjamu Newcastle United di Stadion Hill Dickinson. Kedua tim tidak hanya memburu tiket perempat final Piala Liga, tetapi juga menghadapi pertemuan lanjutan Liga Primer empat hari kemudian.

Everton datang dengan dua kekalahan beruntun setelah takluk 0-2 dari Chelsea dan Arsenal. Produktivitas juga menjadi persoalan karena tim asuhan David Moyes itu baru mencetak delapan gol di Liga Primer musim ini.

“Kami membutuhkan lebih banyak peluang. Kami menghadapi lawan yang sangat kuat sehingga mungkin tidak akan mendapatkan tiga, empat, lima, atau enam peluang. Namun, kami harus berusaha memaksimalkan setiap kesempatan yang ada,” kata Moyes seperti dikutip dari laman resmi klub.

Everton melaju ke putaran keempat setelah mengalahkan Preston North End 4-0 dan Wolverhampton Wanderers 1-0. Mereka kini berusaha mencapai perempat final untuk kedua kalinya dalam enam tahun terakhir.

Meski demikian, catatan Moyes di Piala Liga menghadapi sesama



AFP/DARREN STAPLES

ARSENAL TERSINGKIR: Bek Fleetwood Town Finley Potter (kanan) berebut bola dengan gelandang Arsenal Kai Havertz pada pertandingan putaran keempat Piala Liga Inggris di Stadion Highbury, Fleetwood, Inggris, Selasa (27/10). Fleetwood Town menang 5-3 melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1 hingga waktu normal.

klub Liga Primer belum sepenuhnya menjanjikan karena tercatat tersingkir dalam tujuh dari 10 pertandingan terakhirnya di kompetisi tersebut.

NEWCASTLE BIDIK GELAR KEDUA

Newcastle memiliki modal positif setelah mengalahkan Crystal Palace

2-0. Hasil itu mengakhiri periode sulit setelah mereka menelan tiga kekalahan dalam empat pertandingan sebelumnya.

Pelatih Newcastle, Mattias Jaisle, mendapat respons positif setelah melakukan penyesuaian untuk memperkuat pengalaman dan kepemimpinan di dalam skuad. Per-

ubahan tersebut diharapkan menjadi modal untuk menjaga konsistensi tim dalam menghadapi jadwal padat.

“The Magpies’ juga memiliki ambisi besar di Piala Liga setelah menjuarai kompetisi tersebut pada musim 2024. Sejak musim 2022-2023, Newcastle telah memenangi 18 pertandingan Piala Liga, terbanyak

jika dibandingkan dengan tim lain. Mereka juga memenangi tujuh laga terakhir pada putaran keempat.

Meski demikian, Everton tetap berpotensi menyulitkan. Dalam enam pertemuan terakhir kedua tim, Newcastle hanya meraih satu kemenangan, dengan dua hasil imbang dan tiga kekalahan. (1-3)



AFP/INA FASSBENDER

MERAYAKAN GOL: Gelandang Borussia Dortmund Marcel Sabitzer (tengah) merayakan gol ketiga bersama rekan-rekannya pada pertandingan putaran kedua Piala Jerman (DFB-Pokal) melawan Werder Bremen di Dortmund, Jerman, Selasa (27/10). Dortmund menang 3-2 atas Bremen melalui gol Sabitzer pada menit ke-90+3 dan memastikan diri lolos ke babak 16 besar.

Sabitzer Selamatkan Dortmund dari Mimpi Buruk

Tendangan bebas di pengujung laga membantu Dortmund masuk ke babak ketiga Piala Jerman.

BORUSSIA Dortmund dan RB Leipzig berhasil melangkah lebih jauh di Piala Jerman setelah melewati pertandingan ketat, kemarin WIB.

Dortmund menang 3-2 atas Werder Bremen pada putaran kedua. Sementara itu, Leipzig harus berjuang keras sebelum mengalahkan Rot-Weiss Essen 2-1.

Saat melawan Bremen, Dortmund sempat unggul dua gol melalui Serhou Guirassy dan Carney Chukwuemeka. Namun, mereka kehilangan keunggulan akibat dua gol Niclas Fuellkrug dalam rentang empat menit.

Marcel Sabitzer kemudian menjadi penentu lewat tendangan bebas melengkung pada masa tambahan waktu yang mengarah ke sudut kiri atas gawang.

“Saya sangat senang bola itu masuk. Kaki kanan saya memang cukup bagus. Gol ini penting bagi tim, tetapi juga berarti bagi saya secara

Catatan KNVB Beker menunjukkan Nathan memenangi 50% duel, mencatat akurasi umpan 93%, melakukan 61 sentuhan, dan menciptakan satu umpan progresif.”

pribadi,” kata Sabitzer kepada Sky Germany.

Fuellkrug sendiri tampil tajam sejak dipinjam Bremen dari West Ham United. Ia telah mencetak 11 gol dalam sembilan penampilan musim ini, termasuk gol dalam tujuh per-

tandingan terakhir.

Di tempat lain, Leipzig tertinggal dari lawan melalui gol Lucas Brumme dan kehilangan Nicolas Seiwald akibat kartu kuning kedua, tetapi akhirnya membalikkan keadaan lewat dua gol Christoph Baumgartner dalam 12 menit terakhir.

Pada laga lain, Eintracht Frankfurt menundukkan Hamburg 3-1 melalui gol Robin Koch, Jonathan Burkardt, dan Younes Ebnoutalib. Cologne menang telak 5-0 atas Union Berlin, dengan Said El Mala mencetak dua gol.

Sebaliknya, Mainz dan Elversberg tersingkir setelah kalah dari Bochum dan Darmstadt. Augsburg serta Borussia Monchengladbach melaju ke babak 16 besar.

KONTRIBUSI TJOE-A-ON

Di Piala Belanda, pemain timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On tampil penuh sebagai bek kiri Willem II saat menang 4-3 atas Helmond pada babak 32 besar. Catatan KNVB Beker menunjukkan Nathan memenangi 50% duel, mencatat akurasi umpan 93%, melakukan 61 sentuhan, dan

menciptakan satu umpan progresif.

Willem II menang berkat gol Devin Haen, dua gol Eser Gurbuz, dan Tonny de Vilhena Trindade. Helmond membalas melalui Michel Ludwig dan dua gol Labinot Bajrami. Go Ahead Eagles juga lolos setelah mengalahkan HFC 5-0 melalui gol Melle Meulenstein, Oskar Sivertsen, Thibo Baeten, Joris Kramer, dan Tomas Galvez.

Di Spanyol, Villarreal menang 5-0 atas Manacor pada putaran pertama Copa del Rey. Gol dicetak Alassane Diatta, Tani Oluwaseyi, Sergi Cardona, Nizar El Jmili, dan Nicolas Pepe. Malaga juga melaju setelah menang 3-0 atas Sporting de Alcazar melalui dua gol Chupe dan satu gol Daniel Fernandez Lorenzo pada babak kedua.

Kejutan terjadi ketika Espanyol kalah 3-4 dari Sestao River setelah pertandingan berlanjut hingga babak tambahan. Sestao mencetak gol melalui Adri Carrion, Andoni Ugarte, Ander Laka, dan Jon Rojo. Espanyol membalas lewat Marcos Fernandez, Roberto Fernandez, dan Gabriel Moscardo, tetapi gagal menghindari eliminasi. (Dhk/I-3)



ANTARA /ARNAS PADDA

GEOPARK MAROS: Pengunjung menikmati suasana salah satu situs geologi di kawasan Geopark Maros-Pangkep, Taman Batu Karst Balocci di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, Minggu (13/11/2022). Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda kawasan pegunungan karst UNESCO Global Geopark Maros-Pangkep, khususnya di area Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Sulawesi Selatan. Kobaran api sempat mendekati kawasan situs gua prasejarah yang menyimpan artefak serta lukisan cadas purba hingga berjarak kurang dari 1 kilometer.

- Kemenbud akan menginventarisasi situs-situs yang terdampak kebakaran dan mengidentifikasi kerusakannya untuk menentukan tindakan pemulihan yang sesuai.
- Penyelamatan situs prasejarah membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal.
- Data ilmiah dan warisan leluhur merupakan aset yang tidak dapat diperbarui apabila hilang atau rusak.

Karhutla Ancam Situs Prasejarah

DESPIAN NURHIDAYAT
despian@mediaindonesia.com

KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) mengancam kelestarian situs cagar budaya di Sulawesi Selatan, mulai dari lukisan gua prasejarah di kawasan Geopark Maros hingga kuburan batu di Toraja. Pemerintah didesak memperkuat mitigasi dan penanganan darurat untuk mencegah kerusakan warisan sejarah yang tidak dapat diperbarui.

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan karhutla dapat dipicu oleh aktivitas manusia maupun faktor alam, termasuk fenomena El Nino yang berkepanjangan. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara serius, terutama di wilayah yang memiliki situs cagar budaya.

“Karhutla ini bisa disebabkan oleh ulah manusia yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Saya rasa ini menjadi tindakan kriminal yang biadab karena merusak. Tapi, ada juga faktor alam yang dipicu El Nino yang panjang sehingga bisa memicu kebakaran,” ujar Fadli, beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan, Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) akan melakukan inventarisasi situs-situs yang terdampak kebakaran.

Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi kerusakan sekaligus menentukan tindakan pemulihan yang sesuai. “Dalam hal ini, kalau ada situs-situs yang terdampak karhutla, kita akan lakukan inventarisasi dan nanti bagaimana revitalisasi atau restorasi terhadap situs-situs tersebut,” kata Menbud.

Ancaman karhutla terhadap situs bersejarah menjadi perhatian karena sejumlah peninggalan prasejarah memiliki nilai penting bagi pengetahuan, identitas, dan kebudayaan bangsa. Kerusakan pada situs tersebut berpotensi menghilangkan bukti sejarah yang tidak dapat dikembalikan seperti semula.

SINERGI

Dihubungi secara terpisah, budayawan sekaligus Kepala Centre for Eastern Indonesian Studies di Universitas Atma Jaya, Y Argo Twikromo, menilai penyelamatan situs prasejarah membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Menurutnya, Kemenbud, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu menyatukan langkah dalam penanganan karhutla di kawasan yang memiliki situs bersejarah.

Ia mengingatkan, koordinasi lintas sektor harus mengutamakan

“

Pemetaan tumpang susun antara peta sebaran situs prasejarah dan peta titik panas karhutla perlu dilakukan secara cepat.”

Y ARGO TWIKROMO
Budayawan, Kepala Centre for Eastern Indonesian Studies di Universitas Atma Jaya

tindakan nyata, bukan kepentingan sektoral tiap-tiap instansi. “Ego sektoral maupun masing-masing kepentingan bukan menjadi keutamaan supaya kita semua dapat berpadu dalam upaya agar jangkar budaya yang menghubungkan generasi masa kini dengan akar spiritualitas Nusantara tidak teramputasi,” ujar Argo.

Menurutnya, data ilmiah dan warisan leluhur merupakan aset yang tidak dapat diperbarui apabila hilang atau rusak. Karena itu, penanganan karhutla harus dilakukan melalui kerja sama yang mengedepankan keharmonisan antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.

PROTOKOL DARURAT
Argo mendorong penerapan pro-

tolak darurat untuk mempercepat penyelamatan situs prasejarah yang terancam kebakaran. Salah satu langkah penting ialah memadukan peta persebaran situs prasejarah dengan peta titik panas atau *hotspot* karhutla.

Pemetaan tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi lokasi situs yang berada di sekitar titik panas sehingga upaya pencegahan dan pemadaman dapat diprioritaskan berdasarkan tingkat ancamannya.

“Protokol darurat atau tindakan cepat perlu diterapkan dalam menyelamatkan situs prasejarah tersebut. Pemetaan tumpang susun antara peta sebaran situs prasejarah dan peta titik panas karhutla perlu dilakukan secara cepat,” tukasnya. (H-1)

PENGUMUMAN
PT.TANAMAS INDONESIA PROPERTY
Untuk memenuhi ketentuan pasal 82 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 9 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi **PT.TANAMAS INDONESIA PROPERTY**, berkedudukan di Kota Surabaya dan beralamat lengkap di Alam Hijau E4 Citraland nomor 43, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya 60219 ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa **Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("RUPS Tahunan")**, yang akan diselenggarakan pada :
Hari/tanggal : Senin, 16 Nopember 2026
Tempat : Ayam Rajawani, Jalan Mayjen Sungkono nomor 206-208, Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya 60189
Waktu : 13.00 WIB s.d. selesa;
Agenda :
1. Pemberian Dispensasi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2025 di luar waktu yang ditentukan dalam Pasal 66 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris serta Para Pemegang Saham Perseroan yang menyatakan bahwa status perseroan merupakan PT. Tertutup yang laporan keuangannya memenuhi ketentuan wajib audit oleh Akuntan Publik;
3. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang memuat :
a. Laporan Keuangan Tahunan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2025;
b. Laporan Kegiatan Perseroan;
c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku 2025 yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025;
f. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Penetapan jumlah kerugian Perseroan sampai tahun buku 2025;
5. Lain-lain;
Catatan:
1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan.
2. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri RUPS Tahunan dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili pemegang saham dengan melampirkan Surat Kuasa Secara Notarial.
3. Bahan-bahan RUPS Tahunan tersedia di Kantor Perseroan, pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPS Tahunan dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
Kota Surabaya
Direksi
PT.TANAMAS INDONESIA PROPERTY

PENGUMUMAN
PT.TANAMAS INDONESIA PROPERTY
Untuk memenuhi ketentuan pasal 82 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 9 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi **PT.TANAMAS INDONESIA PROPERTY**, berkedudukan di Kota Surabaya dan beralamat lengkap di Alam Hijau E4 Citraland nomor 43, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya 60219 ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa **Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPS Luar Biasa")**, yang akan diselenggarakan pada :
Hari/tanggal : Senin, 16 Nopember 2026
Tempat : Ayam Rajawani, Jalan Mayjen Sungkono nomor 206-208, Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya 60189
Waktu : 11.00 WIB s.d. selesa;
Agenda :
1. Penegasan kembali agenda yang tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.TANAMAS INDONESIA PROPERTY tanggal 13 Desember 2024, dibuat dihadapan AFRIZAL, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang, di bawah nomor 9, yang perubahannya telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia ternyata dari suratnya nomor AHU-AH.01.09-0290090 tertanggal 18 Desember 2024, dengan agenda sebagai berikut :
a. Persetujuan penetapan pemberhentian Tuan CHRISTIAWAN CHANDRA sebagai Direktur Utama Perseroan
b. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan
c. Persetujuan Penetapan Pengembalian Data-data, Dokumen-dokumen dan aset-aset Perseroan yang dikuasai oleh Tuan CHRISTIAWAN CHANDRA termasuk namun tidak terbatas dokumen masyarakat yang memiliki hubungan langsung dan/atau tidak langsung dalam berbisnis dengan perseroan
d. Pembahasan Rencana Perusahaan ke depan
e. Menetapkan dan menetapkan serta mengangkat Tuan Ryan Prasetyo sebagai Direktur Utama PT.Tanamas Indonesia Property
Catatan:
1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Luar Biasa adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan.
2. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri RUPS Luar Biasa dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili pemegang saham dengan melampirkan Surat Kuasa Secara Notarial.
3. Bahan-bahan RUPS Luar Biasa tersedia di Kantor Perseroan, pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPS Luar Biasa dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
4. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan/keberatan atas agenda tersebut harap menyampaikan surat secara tertulis disertai bukti-bukti sah kepada Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman.
Kota Surabaya
Direksi
PT.TANAMAS INDONESIA PROPERTY

SHA INE FEBRIYANTI

Observasi ke Lokalisasi

Memperoleh gambaran nyata tentang realitas kehidupan serta alasan di balik keputusan para pekerja seks.

DEMI memperdalam karakter di film drama thriller terbaru *Netflix* berjudul *Secrets*, aktris Sha Ine Febriyanti langsung mendatangi kawasan lokalisasi. Dalam film tersebut, Sha Ine berperan sebagai Parni, perempuan yang terjebak di dunia prostitusi setelah melarikan diri dari pasangannya yang abusif.

Sha Ine bersama Ruth Marini, pemeran Darsi, menyempatkan diri melakukan observasi langsung ke kawasan lokalisasi. Keduanya melakukan interaksi selama 4 jam di tempat tersebut, Sha Ine pun memperoleh gambaran nyata mengenai realitas kehidupan serta alasan mendasar di balik keputusan para pekerja seks di sana.

Pengalaman itu semakin membuatnya mendalami karakter Parni yang dituntut tampil penuh tekanan batin secara konsisten sepanjang alur cerita. Tantangan terbesar bagi dirinya terletak pada penguasaan bahasa tubuh serta penjiwaan ekspresi mikro yang sangat halus.

“Jadi, seperti *microexpression* (perubahan ekspresi wajah dalam waktu sangat singkat). Parni seperti terus menahan sesuatu, terutama ketika kembali bertemu Jamal. Jadi, saya sebagai Parni tidak bisa meledakkan emosi,” ucap Sha Ine.

Keterlibatan Sha Ine dalam proyek itu tak lepas dari sosok sang sutradara, Ravi Bharwani. Faktor nama sutradara membuatnya langsung menerima pinangan peran tanpa ragu.

“Saya belum baca naskahnya, tapi Ravi termasuk daftar sutradara idaman saya. Jadi, ketika saya ditawarkan peran ini, saya tidak berpikir panjang untuk bilang ‘ya’. Ternyata naskahnya memang sangat menantang,” ungkapnya. (Medcom.id/M-2)



INSTAGRAM @INEFEBRIYANTI

ALVIN TEDJO

Fokus Soal Kebijakan bukan Kepribadian

Politikus Kanada keturunan Tionghoa-Indonesia ini memperoleh suara tertinggi sebesar 39,2%.

WALI Kota terpilih Mississauga, Kanada, Alvin Tedjo, menceritakan strategi menghadapi dua pesaing, yakni Wali Kota petahana Carolyn Parrish dan mantan Wali Kota Bonnie Crombie, turut mengantarkannya menjadi pemenang.

Tedjo, politikus keturunan Tionghoa-Indonesia, menyebut kampanye yang digaungkan berfokus pada kebijakan, bukan sosok pribadi dirinya.

“Kami fokus membangun tim yang mampu menjangkau setiap sudut kota agar bisa benar-benar berinteraksi dengan warga secara nyata sebelum menyusun program. Dengan begitu, kami memperoleh semua saran dan masukan yang diperlukan dari penduduk kota untuk menciptakan sesuatu yang bisa mereka banggakan,” ujar Tedjo seperti dikutip dari CBC, kemarin.

Tedjo menuturkan timnya tidak menganggap remeh apa pun. Dalam debat pemilihan wali kota, Parish dan Crombie saling melontarkan kritik tajam. Perseteruan terbuka itu, menurut Tedjo, justru mendorong para pemilih untuk melirik kampanyenya yang dinilai lebih positif dan konstruktif.



INSTAGRAM @ALVINTEDJO

Dalam pemilihan, Tedjo berhasil memperoleh 74.479 suara, atau 39,2%. Ia unggul atas Parrish yang meraih 51.853 suara, atau 27,3%, serta Crombie dengan 43.191 suara, atau 22,7%. Sehari setelah kemenangan, Tedjo mengumumkan prioritasnya sebagai Wali Kota Mississauga yang baru, yakni berfokus pada masalah keterjangkauan biaya, kriminalitas, perumahan, transportasi, dan perekonomian.

“Kami telah mengajukan solusi-solusi praktis yang akan membawa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Kini saatnya untuk mewujudkan solusi-solusi tersebut,” ujar Tedjo kepada para wartawan di depan Balai Kota Mississauga pada Selasa (27/10).

“Selama empat tahun ke depan, saya berkomitmen untuk menjaga kepercayaan luar biasa yang telah diberikan rekan-rekan sesama warga. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa terpilih sebagai Wali Kota Mississauga yang baru, serta membangun masa depan yang lebih baik bagi setiap warga.” (Metrotv/M-2)

REZA RAHADIAN

Punya Harapan untuk Indonesia Lebih Baik

- Selama anak muda masih bisa menyuarakan keresahan, masih ada harapan pada bangsa.
- Di tengah keterbatasan figur, masih banyak individu yang memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia.
- Pergerakan anak muda juga terjadi di belahan dunia lain.

NAURA PUTRI AFLIA

reporter@mediaindonesia.com

PERINGATAN Hari Sumpah Pemuda memiliki esensi yang berbeda bagi setiap orang, seperti aktor sekaligus sutradara Reza Rahadian yang memaknai sebagai ajakan membangun semangat kaum muda untuk berani bersuara. Suara-suara kebenaran itu ditujukan untuk menjaga harapan bangsa.

Sumpah Pemuda ialah hari nasional yang diperingati setiap 28 Oktober untuk mengenang peristiwa bersejarah Kongres Pemuda II pada 1928. Pada momen tersebut, pemuda-pemudi dari berbagai daerah di Nusantara mengikrarkan janji suci demi mewujudkan persatuan Indonesia

Reza mengatakan harapan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik berada di tangan generasi muda.

“Selama masih bisa mendengar anak-anak muda menyuarakan keresahan mereka, kepedulian mereka, kecintaan mereka pada Republik ini, pada bangsa ini, di situlah saya merasa bahwa kita selalu punya harapan untuk Indonesia yang lebih baik,” kata Reza dalam wawancara bersama *Medcom.id*.

Ia melihat pemuda-pemudi Indonesia menyimpan potensi besar serta menjadi tumpuan harapan bagi perubahan positif bangsa.

“Jadi, itu bagaimana saya memandang secara pribadi makna dari Sumpah Pemuda hari ini, bahwa kita punya harapan-harapan yang ada pada pemuda-pemudi Indonesia,” lanjut Reza.

KEHADIRAN FIGUR PENTING

Pemeran Adil dalam film *Siksa Kubur* itu juga menyampaikan pentingnya kehadiran figur teladan bagi kaum muda. Meskipun tidak banyak, menurutnya, saat ini masih ada tokoh bangsa yang bisa menjadi teladan bagi kaum muda dalam mengisi kemerdekaan.

“Salah satu yang penting di Hari Sumpah Pemuda ini adalah mungkin tidak terlalu banyak negarawan hari ini atau yang bisa disebut negarawan, tidak terlalu banyak orang yang digugu dan ditiru,” ungkapnya.

Meski demikian, ia percaya di tengah keterbatasan figur tersebut, masih banyak individu yang terus memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia melalui peran masing-masing. “Saya yakin ada banyak orang yang berkontribusi dengan langkah mereka masing-masing untuk Indonesia yang lebih baik,” tutur Reza.

LAUT BER CERITA

Saat ini, Reza tengah menjalani

proyek film *Laut Ber cerita*. Film tersebut diadaptasi dari novel karya Leila S Chudori dan tayang di bioskop mulai hari ini.

Film *Laut Ber cerita* berkisah tentang Biru Laut (diperankan Reza Rahadian) dan rekan-rekannya di Geng Winatra yang nekat memperjuangkan keadilan hingga akhirnya diculik serta dihilangkan secara misterius. Kepergian mereka memicu penantian panjang keluarga yang terus berjuang mencari kepastian atas nasib orang-orang terkasih.

Film tersebut memiliki relevansi dengan peran dan semangat pemuda di masa kini. Bagi Reza, film itu turut memelihara harapan pada suara-suara anak muda, harapan pada bagaimana sikap mereka yang kritis dan berbagai macam hal yang bahkan memberikan pelajaran bagi generasi sebelumnya.

Menurutnya, sampai kapan pun itu, negara dan masyarakatnya akan terus membutuhkan suara dan tindakan para anak pemuda. Ia pun melihat pergerakan anak muda juga terjadi di belahan dunia lain.

“Kita bisa melihat pergerakan-pergerakan anak muda di belahan dunia lain yang turut memperjuangkan hak yang sangat mendasar seperti hak atas pendidikan dan hak atas kehidupan yang layak,” tuturnya.

Ia menegaskan pentingnya para pengambil keputusan dan yang duduk di kursi kepemimpinan untuk membuka ruangan bagi para pemuda selear-lebar-nya. Suara anak muda berfungsi sebagai pengingat apabila suatu aspek kehidupan perlu dikritisi dan diperbaiki. (Medcom.id/Ant/M-2)



MI/ RAMDANI

ON THIS DAY - 29 OKTOBER

1618: Eksekusi Sir Walter Raleigh

SIR Walter Raleigh, petualang, penulis, dan orang kepercayaan Ratu Elizabeth I dari Inggris, dipenggal di London pada 29 Oktober 1618.



BRITANNICA.COM

Eksekusi tersebut merupakan pelaksanaan kembali hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya pada 1603 atas tuduhan berkonspirasi melawan Raja James I, penerus Elizabeth.

Semasa pemerintahan Elizabeth, Raleigh berperan dalam tiga ekspedisi besar ke Amerika, termasuk upaya mendirikan permukiman Inggris di Pulau Roanoke, wilayah yang kini menjadi bagian dari North Carolina, Amerika Serikat. Kariernya di istana meredup setelah sang ratu mengetahui pernikahan rahasianya dengan Elizabeth Bess Throckmorton, salah seorang dayang kehormatan kerajaan, pada 1592. Raleigh dan istrinya dipenjarakan di Menara London. Setelah dibebaskan, Raleigh menikahi Bess dan hubungannya dengan sang ratu tidak pernah sepenuhnya pulih.

Setelah Elizabeth meninggal pada 1603, Raleigh dituduh terlibat dalam konspirasi untuk menggulingkan James I dan dihukum mati. Namun, hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup. Setelah lebih dari satu dekade mendekam di Menara London, ia dibebaskan pada 1616 untuk memimpin ekspedisi ke Guyana, Amerika Selatan, guna mencari emas dan kota legendaris El Dorado.

Ekspedisi yang berangkat pada 1617 itu berakhir dengan kegagalan.

1863: Palang Merah Internasional Berdiri

GERAKAN Palang Merah Internasional bermula di Jenewa, Swis, pada 29 Oktober 1863, ketika sebuah konferensi internasional mengadopsi sejumlah resolusi untuk membantu tentara yang terluka dalam perang.



WIKIPEDIA

Gagasan itu dipelopori Henry Dunant, pengusaha Swis yang tergerak oleh penderitaan korban Perang tempuran Solferino pada 1859. Gerakan tersebut kemudian berkembang menjadi jaringan kemanusiaan internasional yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak oleh konflik, bencana, dan krisis kesehatan.

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional berpegang pada prinsip kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, dan kesukarelaan. Tujuannya ialah melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, menjaga martabat manusia, serta mencegah dan meringankan penderitaan tanpa diskriminasi berdasarkan kebangsaan, ras, agama, kelas sosial, dan pandangan politik.

Gerakan itu terdiri atas tiga komponen utama. Pertama, Komite Internasional Palang Merah (International Committee of the Red Cross/ICRC). Kedua, Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies/IFRC). Ketiga, perhimpunan nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

1975: Kuasa Franco Berakhir

JENDERAL Francisco Franco, diktator Spanyol yang berkuasa sejak 1939, mulai kehilangan kendali atas pemerintahan akibat kondisi kesehatannya yang semakin memburuk.

Pada akhir Oktober 1975, penyakit yang dideritanya membuat Franco tidak lagi mampu menjalankan tugas sebagai kepala negara secara normal. Kekuasaan sementara kemudian diserahkan kepada Pangeran Juan Carlos, calon penerus yang telah ditunjuknya beberapa tahun sebelumnya.

Juan Carlos saat itu berusia 37 tahun. Ia ditetapkan sebagai penerus Franco pada 1969 meskipun penunjukannya sebagai raja baru akan berlaku setelah sang diktator meninggal dunia. Penyerahan tugas kepala negara kepada Juan Carlos dilakukan pada 30 Oktober 1975, ketika kondisi kesehatan Franco semakin kritis.

Franco meninggal dunia pada 20 November 1975 setelah memerintah Spanyol selama sekitar 36 tahun. Dua hari kemudian, Juan Carlos diproklamasikan sebagai raja Spanyol. Pergantian kepemimpinan tersebut menandai berakhirnya pemerintahan diktator Franco yang telah berlangsung sejak kemenangan kelompok nasionalis dalam Perang Saudara Spanyol. Di bawah kepemimpinan Juan Carlos, Spanyol memasuki masa transisi menuju demokrasi.



AFFP